Indeks Ketahanan Pangan 2021

Indeks Ketahanan Pangan 2021

Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
Badan Ketahanan Pangan
Kementerian Pertanian

INDEKS KETAHANAN PANGAN 2021

2021, Badan Ketahanan Pangan

Pengarah:

Dr. Sarwo Edhy S.P., M.M

Penanggungjawab:

Dr. Andriko Noto Susanto, S.P., M.P

Tim Penyusun:

Dr. Tono, S.P, M.Si

Dian Wuri Andayani, S.TP, M.P

Lintang Dewi Maheswari, S.P

Nabila Ayu Ulfa, S.P

Jumlah Halaman: vi + 57 halaman

Ukuran: 21 cm x 29,7 cm

ISBN: 978-623-99454-6-6

Badan Ketahanan Pangan

Kementerian Pertanian RI

Jalan Harsono RM No. 3, RT.05/RW.07, Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550

Sambutan Kepala Badan Ketahanan Pangan

Pangan selalu menjadi isu strategis dalam pembangunan baik di tingkat global maupun nasional, karena pemenuhan pangan merupakan hak setiap warga negara yang harus dijamin kuantitas dan kualitasnya, aman dan bergizi. Terlebih di tengah pandemi Covid-19 yang terjadi mempengaruhi sistem pangan dan ketahanan pangan nasional. Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memperkuat ketahanan pangan sebagai upaya untuk menyediakan pangan bagi 270,2 juta penduduk Indonesia, sehingga menjadi sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif, serta berdaya saing sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2012. Komitmen tersebut sejalan dengan upaya pencapaian tujuan kedua dalam Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*/SGDs) yaitu menghilangkan kelaparan (*zero hunger*) pada tahun 2030.

Penanganan permasalahan kerentanan pangan tidak hanya menjadi domain dari Kementerian Pertanian tetapi juga membutuhkan peran aktif dari kementerian/lembaga lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Terlebih tantangan ketahanan pangan semakin besar dengan adanya isu-isu pangan global dan perubahan iklim.

Saya sangat mengapresiasi terbitnya Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2021 yang menggambarkan peringkat ketahanan pangan wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Saya sangat berharap IKP ini dapat menjadi salah satu acuan bagi pemangku kepentingan dalam melakukan sinergi program peningkatan ketahanan pangan wilayah.

Plt. Kepala Badan Ketahanan Pangan

Dr. Sarwo Edhy, SP., MM

Kata Pengantar Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Nilai IKP dapat menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Dengan demikian IKP dapat menjadi salah satu alat untuk menentukan prioritas daerah menerima intervensi program penguatan ketahanan pangan. Nilai IKP 2021 ini merupakan bagian dari *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2021.

IKP 2021 tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan merupakan pemutakhiran IKP 2020 yang telah disusun sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilakukan akan terlihat dari peningkatan nilai IKP. Oleh karena itu, IKP menjadi penting pada saat perencanaan program kegiatan pengentasan daerah rentan rawan pangan untuk menetapkan wilayah prioritas dan intervensi program spesifik yang akan dilaksanakan.

Semoga akselerasi program ketahanan pangan lebih cepat, fokus, dan tepat sasaran sehingga target pemerintah untuk pemerataan pertumbuhan pembangunan melalui penurunan stunting, kemiskinan dan kerentanan pangan dapat segera terwujud.

Kepala Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Dr. Andriko Noto Susanto, SP, MP

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Gambar

Indeks Ketahanan Pangan

Pendahuluan

Tersedianya informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik dapat mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi. Informasi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan PP No. 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk membangun, menyusun, dan mengembangkan Sistem Informasi Pangan dan Gizi yang terintegrasi. Informasi ini sangat penting untuk memberikan arah dan rekomendasi bagi para pembuat keputusan dalam penyusunan program, kebijakan, serta pelaksanaan intervensi di tingkat pusat dan daerah.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian indikator. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Badan Ketahanan Pangan (BKP) pada tahun 2021 menyusun IKP Nasional dengan unit analisis tingkat kabupaten/kota dan provinsi sebagai pemutakhiran IKP 2020. Penyusunan IKP mengadopsi pengukuran indeks global (*Global Food Security Index - GFSI*) dengan berbagai penyesuaian metodologi sesuai dengan ketersediaan data dan informasi di tingkat wilayah kabupaten/kota dan provinsi. IKP ini juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas* - FSVA), karena indikator yang digunakan dalam IKP merupakan indikator yang juga digunakan dalam penyusunan FSVA Nasional. Hal ini dilakukan agar hasil IKP sejalan dengan hasil FSVA.

IKP Nasional memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (*ranking*) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Konsepsi Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro, tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabitas pasokan dan harga pangan (Gambar 1).

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk IKP yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. Sembilan indikator yang digunakan dalam penyusunan IKP merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Pemilihan indikator yang digunakan dalam IKP didasarkan pada: (i) hasil review terhadap indeks ketahanan pangan global; (ii) tingkat sensitivitas dalam mengukur situasi ketahanan pangan dan gizi; (iii) keterwakilan tiga pilar ketahanan pangan; dan (iv) ketersediaan data secara rutin untuk periode tertentu (tahunan) serta mencakup seluruh kabupaten/kota dan provinsi.

Gambar 1.
Kerangka Konsep Ketahanan Pangan dan Gizi
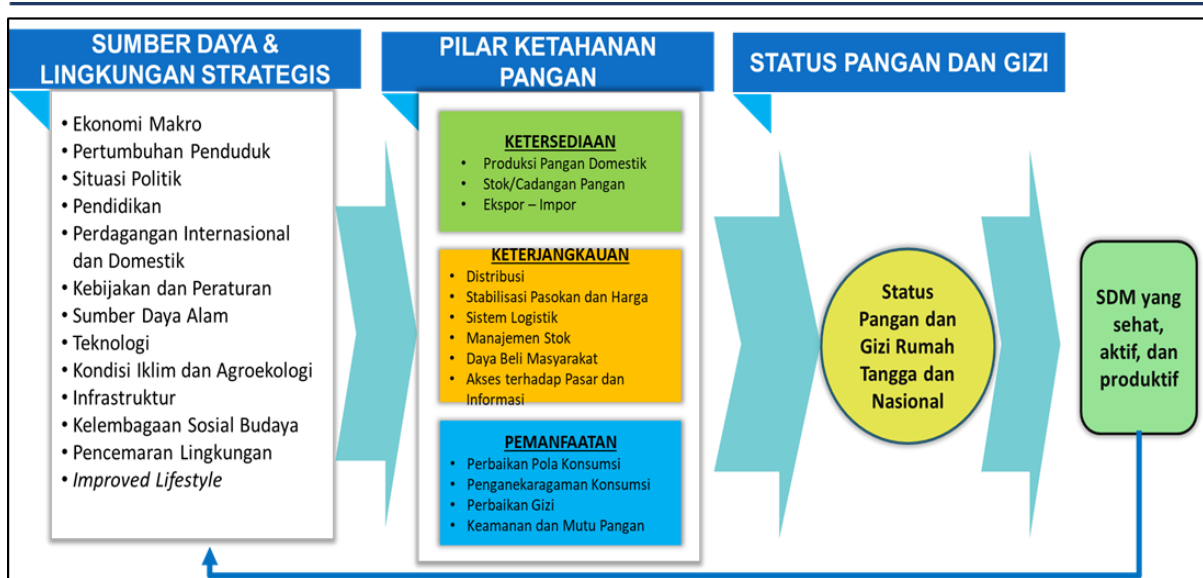
Indikator

Sembilan indikator yang dipilih sebagai dasar penentuan IKP adalah sebagai berikut:

1. **Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih**. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih komoditas padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar, serta stok beras pemerintah daerah. Produksi bersih didekati dari angka produksi setelah dikurangi susut, tercecer, penggunaan untuk benih, pakan dan industri non pangan. Sedangkan konsumsi normatif ditentukan sebesar 300 gram/kapita/hari. Data produksi padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar serta stok beras pemerintah daerah menggunakan angka tetap 2020 dari BPS dan Kementerian Pertanian.

2. **Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan**. Indikator ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh seorang individu untuk hidup secara layak. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak memiliki daya beli yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya sehingga akan mempengaruhi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013; FAO 2015). Data persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan bersumber dari Susenas 2020, BPS.

3. **Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran.** Distribusi pengeluaran untuk pangan dari total pengeluaran merupakan indikator proksi dari ketahanan pangan rumah tangga. Teori *Engel* menyatakan semakin tinggi tingkat pendapatan maka persentase pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi pangan akan semakin turun. Pengeluaran pangan merupakan

proksi yang baik untuk mengukur kesejahteraan dan ketahanan pangan (Suhardjo 1996; Azwar 2004). Makin tinggi kesejahteraan masyarakat suatu negara, maka pangsa pengeluaran pangan penduduknya semakin kecil (Deaton dan Muellbauer 1980). Data yang digunakan bersumber dari Susenas 2020, BPS.

4. **Persentase rumah tangga tanpa akses listrik.** Tersedianya fasilitas listrik di suatu wilayah akan membuka peluang yang lebih besar untuk akses pekerjaan dengan mendorong aktivitas ekonomi di suatu daerah. Karena itu, ketersediaan tenaga listrik dijadikan salah satu indikator kesejahteraan suatu wilayah atau rumah tangga, yang pada akhirnya berdampak pada kondisi ketahanan pangan (DKP dan WFP 2013). Rumah tangga tanpa akses listrik diduga akan berpengaruh terhadap kerentanan pangan dan gizi. Data persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses listrik berumber dari Susenas 2020, BPS.

5. **Rata-rata lama sekolah perempuan di atas 15 tahun.** Rata-rata lama sekolah perempuan adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk perempuan berusia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Tingkat pendidikan perempuan terutama ibu dan pengasuh anak sangat berpengaruh terhadap status kesehatan dan gizi, dan menjadi hal yang sangat penting dalam pemanfaatan pangan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pendidikan berhubungan erat dengan penyerapan pangan dan ketahanan pangan (Khan dan Gill 2009). Sumber data yang digunakan berasal dari Data Susenas 2020, BPS.

6. **Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih.** Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih, yaitu persentase rumah tangga yang tidak memiliki akses ke air minum yang berasal dari air leding/PAM, pompa air, sumur atau mata air yang terlindung dan air hujan (termasuk air kemasan) dengan memperhatikan jarak ke jamban minimal 10 m. Akses terhadap air bersih memegang peranan yang sangat penting untuk pencapaian ketahanan pangan. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, daerah dengan akses terhadap air bersih rendah memiliki kejadian malnutrisi yang tinggi (Sofiati 2010). Peningkatan akses terhadap fasilitas sanitasi dan air layak minum sangat penting untuk mengurangi masalah kesehatan khususnya diare, sehingga dapat memperbaiki status gizi melalui peningkatan penyerapan zat-zat gizi oleh tubuh (DKP dan WFP 2015; Kavosi et al. 2014). Sumber data berasal dari data Susenas 2020, BPS.

7. **Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk.** Ketersediaan tenaga kesehatan (dokter umum, dokter spesialis, dokter gigi, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian medis) yang cukup di suatu wilayah akan memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada

masyarakat yang pada gilirannya dapat menekan penyakit-penyakit infeksi yang berdampak pada masalah gizi, sekaligus mengkampanyekan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk akan mempengaruhi tingkat kerentanan pangan suatu wilayah (Lubis 2010; Sofiati 2010). Data tenaga kesehatan bersumber dari Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan Tahun 2020, Kementerian Kesehatan.

8. **Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting).** Balita stunting adalah anak di bawah lima tahun yang tinggi badannya kurang dari -2 Standar Deviasi (-2 SD) dengan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dari referensi khusus untuk tinggi badan terhadap usia dan jenis kelamin (Standar WHO 2005). Status gizi balita merupakan salah satu indikator yang sangat baik digunakan pada kelompok penyerapan pangan (Pemprov NTT *et al.* 2015). Data stunting diperoleh dari hasil Prediksi Stunting (SAE) tahun 2020, Kementerian Kesehatan.

9. **Angka harapan hidup pada saat lahir.** Perkiraan lama hidup rata-rata bayi baru lahir dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas sepanjang hidupnya. Angka harapan hidup merupakan salah satu dampak dari status kesehatan di suatu wilayah. Meningkatnya angka harapan hidup menandakan adanya perbaikan kualitas konsumsi dan kesehatan ibu hamil, status kesehatan secara fisik dan psikis masyarakat pada umumnya, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Angka harapan hidup saat lahir berasal dari Data Susenas 2020, BPS.

Metode Analisis

Metode pembobotan digunakan untuk menentukan tingkat kepentingan relatif indikator terhadap masing-masing aspek ketahanan pangan. Metode pembobotan dalam penyusunan IKP mengacu pada metode yang dikembangkan oleh EIU dalam penyusunan GFSI. Goodridge (2007) menyatakan jika variabel yang digunakan dalam perhitungan indeks berbeda, maka perlu dilakukan secara tertimbang (pembobotan) untuk membentuk indeks agregat yang disesuaikan dengan tujuannya. Penentuan besaran bobot yang digunakan diperoleh melalui *expert judgement* (Tabel 1). Bobot untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Tabel 1.
Bobot Indikator Kabupaten dan Provinsi Berdasarkan *Expert Judgement*

No.	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio konsumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah	0,300
	Sub Total	**0,300**
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,150
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,075
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,075
	Sub Total	**0,300**
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,050
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,150
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,050
8.	Presentase balita stunting	0,050
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,100
	Sub Total	**0,400**

Khusus untuk analisis wilayah perkotaan hanya digunakan delapan indikator dari aspek keterjangkauan dan pemanfaatan pangan, mengingat ketersediaan pangan di tingkat perkotaan tidak dipengaruhi oleh produksi yang berasal dari wilayah sendiri tetapi berasal dari perdagangan antar wilayah. Oleh karena itu, bobot rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan bersih adalah nol karena IKP kota tidak menggunakan indikator dari aspek ketersediaan pangan. Nilai bobot 0,30 dari indikator aspek ketersediaan pangan kemudian dialihkan kepada delapan indikator lainnya secara proporsional berdasarkan masing-masing aspek. Besaran bobot yang digunakan untuk setiap indikator mencerminkan signifikansi atau pentingnya indikator tersebut dalam IKP Kota (Tabel 2).

Tabel 2.
Bobot Indikator Kota Berdasarkan *Expert Judgement*

No	Indikator	Bobot
ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN		
1.	Rasio kosumsi normatif terhadap produksi bersih beras, jagung, ubi jalar, dan ubi kayu, serta stok beras pemerintah daerah	-
	Sub Total	**-**
ASPEK KETERJANGKAUAN PANGAN		
2.	Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan	0,200
3.	Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65% terhadap total pengeluaran	0,125
4.	Persentase rumah tangga tanpa akses listrik	0,125
	Sub Total	**0,450**
ASPEK PEMANFAATAN PANGAN		
5.	Rata-rata lama sekolah perempuan berusia di atas 15 tahun	0,080
6.	Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih	0,180
7.	Rasio jumlah penduduk per tenaga kesehatan terhadap tingkat kepadatan penduduk	0,080
8.	Presentase balita stunting	0,080
9.	Angka harapan hidup pada saat lahir	0,130
	Sub Total	**0,550**

Penghitungan Indeks Ketahanan Pangan

1. Standarisasi nilai indikator dengan menggunakan *z-score* dan *distance to scale* (0 – 100)
2. Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus:

$$\boldsymbol{Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}}$$

Dimana:

i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9
j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98
Y_j : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j
a_i : Bobot masing-masing indikator ke-i
X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j

Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan.

3. Mengelompokan wilayah ke dalam 6 kelompok berdasarkan *cut off point* IKP

   IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP (Tabel 3). *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Tabel 3.
***Cut off Point* Indeks Ketahanan Pangan**

Kelompok IKP	Kabupaten	Kota	Provinsi
1	<= 41,52	<= 28,84	<= 37,61
2	> 41,52 – 51,42	> 28,84 – 41,44	> 37,61 – 48,27
3	> 51,42 – 59,58	> 41,44 – 51,29	> 48,27 – 57,11
4	> 59,58 – 67,75	> 51,29 – 61,13	> 57,11 – 65,96
5	> 67,75– 75,68	> 61,13 – 70,64	> 65,96– 74,40
6	> 75,68	> 70,64	> 74,40

Hasil Indeks Ketahanan Pangan

Hasil Analisis Kabupaten/Kota

Hasil perhitungan IKP 2021 berdasarkan sembilan indikator untuk wilayah kabupaten dan delapan indikator untuk wilayah kota yang mencerminkan tiga aspek ketahanan pangan memberikan gambaran peringkat (*rangking*) pencapaian ketahanan pangan suatu wilayah dibandingkan dengan wilayah lainnya. IKP yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya, sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

Sebanyak 70 kabupaten atau 16,83% dari 416 kabupaten memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 28 kabupaten Prioritas 1; 17 kabupaten Prioritas 2; dan 25 kabupaten Prioritas 3. Kabupaten Prioritas 1 (sangat rentan) tersebar di Provinsi Papua (19 kabupaten), Papua Barat (6 kabupaten), Maluku, Riau, dan Sumatera Barat masing-masing satu kabupaten. Sedangkan pada wilayah kota ada 4 kota (4%) dari 98 kota yang memiliki skor IKP rendah, terdiri dari Kota Subulussalam, Provinsi Aceh (Prioritas 1); serta Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara; Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan; dan Kota Tual, Provinsi Maluku (Prioritas 3).

Gambar 2.
Peta Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten dan Kota 2021
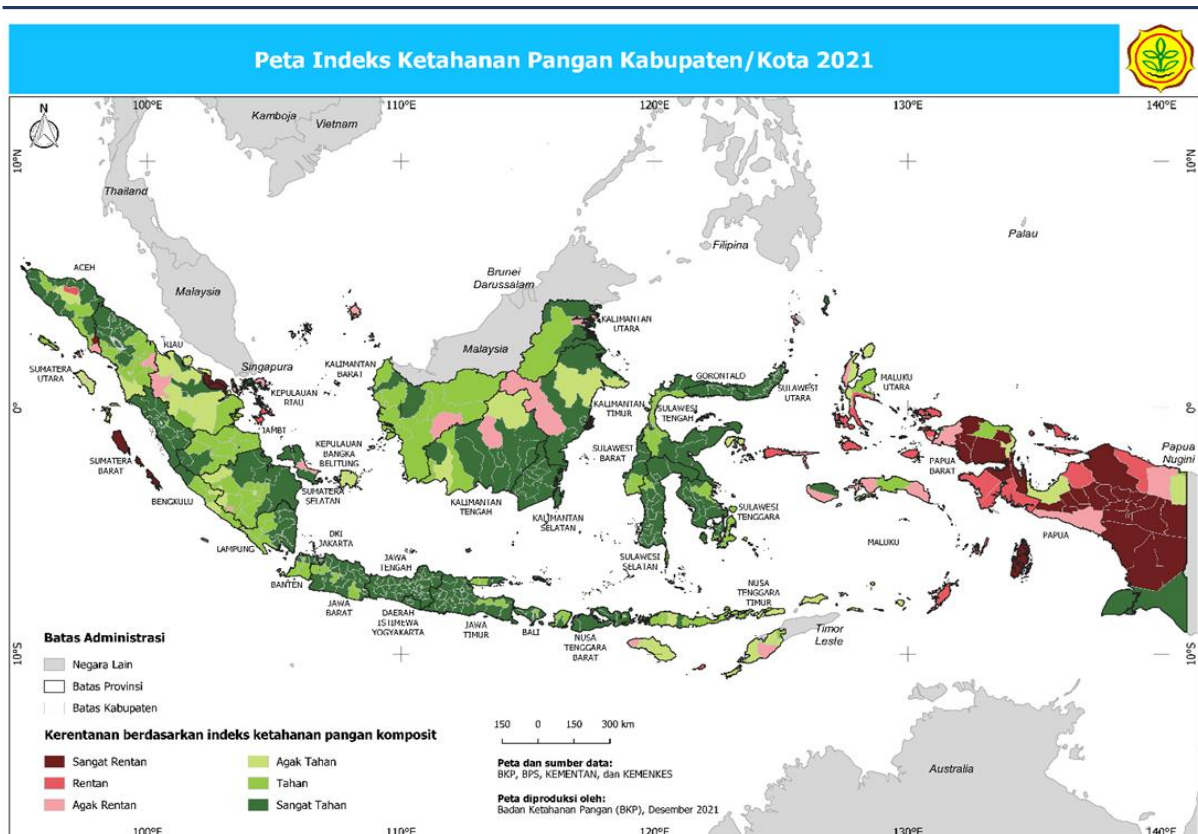
Berdasarkan peringkat IKP Kabupaten, lima kabupaten dengan urutan skor terbaik adalah Tabanan (90,17), Gianyar (89,46) dan Badung (89,38) di Provinsi Bali; Sukoharjo (88,70) dan Pati (88,38) di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan lima kabupaten dengan urutan skor terendah berada di Provinsi Papua, yaitu Nduga (14,89), Puncak (16,17), Dogiyai (17,56), Yahukimo (18,41) dan Deiyai (18,65). Peringkat dan IKP kabupaten secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4.
Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten 2021

Peringkat	Kabupaten	IKP
1	Tabanan	90,17
2	Gianyar	89,46
3	Badung	89,38
4	Sukoharjo	88,70
5	Pati	88,38
6	Gresik	88,25
7	Minahasa Utara	88,18
8	Wonogiri	88,04
9	Karanganyar	87,63
10	Sragen	87,55
11	Magetan	87,09
12	Berau	86,77
13	Kudus	86,69
14	Semarang	86,55
15	Bekasi	86,29
16	Penajam Paser Utara	86,24
17	Luwu Timur	86,07
18	Blora	85,87
19	Demak	85,82
20	Lamongan	85,80
21	Deli Serdang	85,66
22	Karawang	85,63
23	Mesuji	85,60
24	Tanah Bumbu	85,56
25	Pesisir Selatan	85,48
26	Minahasa	85,46
27	Bantaeng	85,41
28	Grobogan	85,39
29	Barru	85,31

Peringkat	Kabupaten	IKP
30	Ponorogo	85,26
31	Kendal	85,18
32	Tapin	85,18
33	Banggai	85,15
34	Tulungagung	85,15
35	Boyolali	85,14
36	Jepara	84,98
37	Madiun	84,85
38	Bolaang Mongondow	84,84
39	Sidenreng Rappang	84,79
40	Barito Utara	84,77
41	Kutai Kertanegara	84,73
42	Tanah Datar	84,68
43	Minahasa Tenggara	84,64
44	Tulang Bawang	84,58
45	Agam	84,48
46	Mojokerto	84,46
47	Bojonegoro	84,40
48	Cilacap	84,23
49	Konawe	84,10
50	Pringsewu	84,05
51	Ngawi	83,86
52	Blitar	83,83
53	Poso	83,76
54	Sumedang	83,73
55	Jombang	83,71
56	Sidoarjo	83,57
57	Pinrang	83,48
58	Minahasa Selatan	83,45

Peringkat	Kabupaten	IKP
59	Sleman	83,39
60	Takalar	83,36
61	Kerinci	83,31
62	Purworejo	83,28
63	Serdang Bedagai	83,23
64	Karo	83,22
65	Maros	83,12
66	Bombana	83,11
67	Aceh Besar	83,09
68	Rembang	83,07
69	Indramayu	83,07
70	Tuban	83,00
71	Batang	82,98
72	Bolmong Utara	82,95
73	Gowa	82,91
74	Solok Selatan	82,87
75	Subang	82,81
76	Wajo	82,81
77	Klungkung	82,80
78	Banyuwangi	82,80
79	Jembrana	82,51
80	Padang Pariaman	82,50
81	Mamuju Tengah	82,34
82	Sumbawa	82,32
83	Sumbawa Barat	82,26
84	Kepulauan Talaud	82,18
85	Nganjuk	82,17
86	Sinjai	82,12
87	Bulukumba	82,10
88	Morowali	81,98
89	Bangka Selatan	81,93
90	Bolmong Timur	81,85
91	Tabalong	81,82
92	Tegal	81,80
93	Simalungun	81,77
94	Temanggung	81,69
95	Kolaka Timur	81,68

Peringkat	Kabupaten	IKP
96	Bone Bolango	81,62
97	Tanah Laut	81,61
98	Klaten	81,60
99	Soppeng	81,50
100	Bone	81,46
101	Kulon Progo	81,46
102	Luwu	81,28
103	Toba Samosir	81,27
104	Lampung Timur	81,20
105	Bangka	81,15
106	Konawe Selatan	81,14
107	Kolaka	81,11
108	Pulang Pisau	81,05
109	Hulu Sungai Utara	81,05
110	Mamuju	80,89
111	Kuningan	80,86
112	Trenggalek	80,84
113	Majalengka	80,79
114	Banjar	80,72
115	Buol	80,71
116	Dairi	80,71
117	Limapuluh Koto	80,66
118	Kediri	80,64
119	Pangandaran	80,64
120	Dharmas Raya	80,62
121	Pohuwato	80,52
122	OKU Timur	80,50
123	Paser	80,48
124	Gunung Kidul	80,36
125	Bireuen	80,29
126	Hulu Sungai Selatan	80,26
127	Karangasem	80,24
128	Boalemo	80,21
129	Lampung Tengah	80,16
130	Bantul	80,06
131	Pasaman Barat	80,02
132	Ciamis	80,01

Peringkat	Kabupaten	IKP
133	Banyumas	79,97
134	Aceh Jaya	79,95
135	Magelang	79,92
136	Ngada	79,87
137	Hulu Sungai Tengah	79,86
138	Malang	79,85
139	Wonosobo	79,83
140	Dompu	79,76
141	Gorontalo Utara	79,76
142	Lampung Selatan	79,66
143	Morowali Utara	79,63
144	Solok	79,59
145	Pasaman	79,57
146	Bengkayang	79,55
147	Pacitan	79,49
148	Lamandau	79,43
149	Bandung	79,41
150	Purbalingga	79,33
151	Pekalongan	79,33
152	Gorontalo	79,25
153	Barito Kuala	79,19
154	Purwakarta	79,14
155	Balangan	79,11
156	Enrekang	79,07
157	Banjarnegara	78,99
158	Pesawaran	78,96
159	Toli-Toli	78,95
160	Sijunjung	78,88
161	Kota Baru	78,85
162	Cirebon	78,84
163	Aceh Tamiang	78,81
164	Langkat	78,80
165	Lumajang	78,70
166	Bangka Barat	78,58
167	Tulang Bawang Barat	78,58
168	Kebumen	78,56
169	Jeneponto	78,55

Peringkat	Kabupaten	IKP
170	Kapuas	78,39
171	Pemalang	78,35
172	Banyuasin	78,30
173	Aceh Barat	77,98
174	Tojo Una-Una	77,90
175	Katingan	77,89
176	Toraja Utara	77,86
177	Mamuju Utara	77,83
178	Kolaka Utara	77,78
179	Merauke	77,75
180	Tapanuli Utara	77,70
181	Serang	77,70
182	Pangkajene Kepulauan	77,61
183	Samosir	77,60
184	Situbondo	77,58
185	Kotawaringin Timur	77,56
186	Bima	77,49
187	Nagan Raya	77,41
188	Aceh Utara	77,38
189	Musi Banyuasin	77,27
190	Pidie Jaya	77,24
191	Buru	77,23
192	Luwu Utara	77,23
193	Merangin	77,23
194	Cianjur	77,21
195	Bulungan	77,19
196	Pasuruan	77,01
197	Brebes	76,91
198	Siak	76,84
199	Ogan Komering Ilir	76,81
200	Bolmong Selatan	76,72
201	Jember	76,70
202	Muna	76,62
203	Garut	76,52
204	Sukabumi	76,31
205	Aceh Barat Daya	76,31
206	Nunukan	76,25

Peringkat	Kabupaten	IKP
207	Aceh Tenggara	76,22
208	Pamekasan	76,18
209	Mukomuko	76,17
210	Sumenep	76,17
211	Barito Timur	76,16
212	Batu Bara	76,15
213	Aceh Timur	76,08
214	Tangerang	76,07
215	Sanggau	76,00
216	Lombok Tengah	75,95
217	Muna Barat	75,91
218	Buleleng	75,79
219	Barito Selatan	75,72
220	Aceh Selatan	75,55
221	Sigi	75,54
222	Humbang Hasundutan	75,51
223	Pidie	75,39
224	Buton Utara	75,35
225	Tanggamus	75,34
226	Musi Rawas	75,33
227	Landak	75,23
228	Parigi Moutong	75,03
229	Way Kanan	74,96
230	Ogan Komering Ulu	74,93
231	Bondowoso	74,89
232	Lombok Barat	74,70
233	Tasikmalaya	74,51
234	Labuhan Batu Utara	74,49
235	Labuhan Batu	74,48
236	Nagekeo	74,39
237	Lebong	74,38
238	Mempawah	74,36
239	Simeulue	74,30
240	OKU Selatan	74,30
241	Bandung Barat	74,18
242	Tapanuli Selatan	74,16
243	Asahan	74,10

Peringkat	Kabupaten	IKP
244	Ketapang	74,05
245	Bangkalan	74,04
246	Konawe Utara	73,87
247	Buton Tengah	73,83
248	Gayo Lues	73,79
249	Malinau	73,66
250	Polewali Mandar	73,57
251	Donggala	73,55
252	Sikka	73,54
253	Batang Hari	73,52
254	Tana Toraja	73,45
255	Pandeglang	73,39
256	Halmahera Timur	73,39
257	Sekadau	73,13
258	Lampung Utara	73,00
259	Lombok Timur	72,86
260	Buton	72,83
261	Muaro Jambi	72,79
262	Tebo	72,73
263	Kuantan Sengingi	72,64
264	Lebak	72,60
265	Kayong Utara	72,56
266	Kubu Raya	72,47
267	Kapuas Hulu	72,41
268	Flores Timur	72,36
269	Bengkulu Selatan	72,30
270	Tanjung Jabung Timur	72,21
271	Sampang	72,16
272	Kaur	72,12
273	Manokwari	72,11
274	Manggarai Barat	71,92
275	Belu	71,89
276	Manggarai	71,88
277	Maluku Tengah	71,74
278	Ogan Ilir	71,74
279	Pesisir Barat	71,60
280	Muara Enim	71,54

Peringkat	Kabupaten	IKP
281	Sintang	71,51
282	PALI	71,31
283	Pakpak Bharat	71,12
284	Selayar	71,01
285	Konawe Kepulauan	70,88
286	Seruyan	70,87
287	Sarolangun	70,82
288	Lampung Barat	70,80
289	Bungo	70,69
290	Lembata	70,43
291	Buton Selatan	70,34
292	Tapanuli Tengah	70,19
293	Bangli	70,04
294	Padang Lawas	69,99
295	Sukamara	69,81
296	Probolinggo	69,80
297	Mamasa	69,68
298	Ende	69,50
299	Indragiri Hilir	69,15
300	Bogor	68,90
301	Lahat	68,85
302	Kepahiang	68,68
303	Lombok Utara	68,67
304	Bengkulu Tengah	68,63
305	Majene	68,63
306	Padang Lawas Utara	68,56
307	Tanjung Jabung Barat	68,54
308	Bengkulu Utara	68,21
309	Sambas	68,16
310	Rejang Lebong	67,54
311	Maluku Barat Daya	67,53
312	Rokan Hilir	67,48
313	Mandailing Natal	67,31
314	Seluma	67,29
315	Wakatobi	67,27
316	Malaka	67,08
317	Nias Utara	66,60

Peringkat	Kabupaten	IKP
318	Belitung Timur	66,52
319	Timor Tengah Utara	66,47
320	Kupang	66,42
321	Rote Ndao	66,41
322	Aceh Tengah	66,31
323	Sumba Timur	66,21
324	Kutai Timur	66,19
325	Pelalawan	66,16
326	Empat Lawang	66,07
327	Murung Raya	65,97
328	Pulau Morotai	65,68
329	Manokwari Selatan	65,31
330	Nias	65,29
331	Nabire	65,00
332	Indragiri Hulu	64,66
333	Sumba Barat	64,63
334	Nias Selatan	63,54
335	Sumba Tengah	61,94
336	Banggai Kepulauan	61,89
337	Kampar	61,78
338	Manggarai Timur	61,74
339	Keerom	61,38
340	Nias Barat	61,29
341	Bengkalis	61,15
342	Halmahera Utara	60,99
343	Belitung	60,93
344	Alor	60,82
345	Musi Rawas Utara	60,33
346	Kotawaringin Barat	60,10
347	Timor Tengah Selatan	59,51
348	Melawai	59,18
349	Bangka Tengah	58,87
350	Bintan	58,82
351	Karimun	58,12
352	Sumba Barat Daya	57,96
353	Kutai Barat	57,76
354	Seram Bagian Timur	57,69

Peringkat	Kabupaten	IKP
355	Natuna	57,64
356	Seram Bagian Barat	57,14
357	Sorong	57,07
358	Tana Tidung	56,00
359	Buru Selatan	55,67
360	Mimika	55,37
361	Rokan Hulu	54,92
362	Jayapura	54,91
363	Kepulauan Sangihe	54,33
364	Labuhan Batu Selatan	54,15
365	Kepulauan Anambas	53,51
366	Siau Tagulandang Biaro	53,28
367	Gunung Mas	53,15
368	Mahakam Ulu	52,75
369	Halmahera Barat	52,06
370	Aceh Singkil	51,97
371	Kepulauan Sula	51,85
372	Kep. Seribu	51,39
373	Sabu Raijua	51,03
374	Halmahera Selatan	50,88
375	Waropen	50,03
376	Bener Meriah	49,97
377	Banggai Laut	49,41
378	Halmahera Tengah	49,39
379	Biak Namfor	49,07
380	Maluku Tenggara	49,03
381	Pulau Taliabu	46,37
382	Lingga	46,35
383	Kaimana	45,73
384	Maluku Tenggara Barat	45,36
385	Fak-Fak	45,06

Peringkat	Kabupaten	IKP
386	Sarmi	44,73
387	Kepulauan Yapen	43,92
388	Raja Ampat	43,24
389	Boven Digoel	41,18
390	Kepulauan Aru	40,76
391	Sorong Selatan	39,74
392	Teluk Bintuni	38,58
393	Kepulauan Meranti	38,12
394	Kepulauan Mentawai	37,67
395	Maybrat	34,59
396	Teluk Wondama	33,06
397	Yalimo	31,73
398	Mappi	31,51
399	Pegunungan Arfak	29,73
400	Supiori	28,11
401	Paniai	27,74
402	Puncak Jaya	26,15
403	Pegunungan Bintang	25,64
404	Lanny Jaya	25,53
405	Jayawijaya	24,58
406	Tolikara	24,00
407	Tambrauw	22,47
408	Mamberamo Tengah	22,31
409	Mamberamo Raya	21,95
410	Asmat	21,16
411	Intan Jaya	19,38
412	Deiyai	18,65
413	Yahukimo	18,41
414	Dogiyai	17,56
415	Puncak	16,17
416	Nduga	14,89

Berdasarkan peringkat IKP Kota, lima kota dengan urutan skor terbaik adalah Denpasar (93,97), Pekanbaru (90,56), Bukittinggi (88,90), Balikpapan (88,68) dan Batam (88,60). Sedangkan lima kota dengan urutan skor terendah yaitu Subulussalam (27,85), Tual (41,83), Gunungsitoli (45,67), Pagar Alam (47,09) dan Lubuklinggau (53,91). Peringkat dan IKP kota secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5.
Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota 2021

Peringkat	Kota	IKP
1	Kota Denpasar	93,97
2	Kota Pekanbaru	90,56
3	Kota Bukittinggi	88,90
4	Kota Balikpapan	88,68
5	Kota Batam	88,60
6	Kota Padang	87,73
7	Kota Solok	87,45
8	Kota Bontang	87,24
9	Kota Ternate	86,74
10	Kota Semarang	86,67
11	Kota Depok	86,04
12	Kota Banda Aceh	85,82
13	Kota Salatiga	85,55
14	Kota Surabaya	85,25
15	Kota Bekasi	85,20
16	Kota Medan	85,02
17	Kota Jakarta Pusat	84,73
18	Kota Pangkal Pinang	84,59
19	Kota Jakarta Selatan	84,41
20	Kota Malang	84,38
21	Kota Kendari	84,28
22	Kota Manado	84,13
23	Kota Jakarta Barat	84,01
24	Kota Payakumbuh	84,00
25	Kota Jakarta Timur	83,97
26	Kota Makasar	83,81
27	Kota Tangerang Selatan	83,74
28	Kota Samarinda	83,72
29	Kota Padang Panjang	83,65
30	Kota Madiun	82,86
31	Kota Cimahi	82,75

Peringkat	Kota	IKP
32	Kota Magelang	82,59
33	Kota Bandung	82,15
34	Kota Tarakan	82,02
35	Kota Yogyakarta	81,88
36	Kota Gorontalo	81,79
37	Kota Ambon	81,71
38	Kota Binjai	81,49
39	Kota Palu	80,92
40	Kota Palangka Raya	80,60
41	Kota Tomohon	80,32
42	Kota Tanjung Pinang	79,80
43	Kota Pare-Pare	79,80
44	Kota Jambi	79,73
45	Kota Pematang Siantar	79,63
46	Kota Jakarta Utara	79,54
47	Kota Mojokerto	79,41
48	Kota Kotamobago	79,13
49	Kota Tangerang	78,88
50	Kota Dumai	78,64
51	Kota Tegal	78,39
52	Kota Banjarmasin	78,34
53	Kota Surakarta	77,92
54	Kota Metro	76,74
55	Kota Kupang	75,64
56	Kota Palopo	75,48
57	Kota Batu	74,74
58	Kota Bogor	74,53
59	Kota Sungai Penuh	74,45
60	Kota Bandar Lampung	74,17
61	Kota Palembang	73,83
62	Kota Mataram	73,44

Peringkat	Kota	IKP
63	Kota Cirebon	73,01
64	Kota Bitung	72,97
65	Kota Pariaman	72,93
66	Kota Bau-Bau	72,70
67	Kota Probolinggo	72,53
68	Kota Banjar Baru	72,23
69	Kota Sorong	71,89
70	Kota Cilegon	71,42
71	Kota Sibolga	71,27
72	Kota Langsa	71,08
73	Kota Jayapura	70,18
74	Kota Pasuruan	70,07
75	Kota Sawah Lunto	69,82
76	Kota Tebing Tinggi	69,41
77	Kota Bima	69,28
78	Kota Pekalongan	68,85
79	Kota Blitar	68,69
80	Kota Kediri	68,60

Peringkat	Kota	IKP
81	Kota Bengkulu	67,82
82	Kota Lhokseumawe	67,45
83	Kota Sabang	67,15
84	Kota Pontianak	66,57
85	Kota Sukabumi	64,05
86	Kota Singkawang	63,22
87	Kota Tasikmalaya	63,12
88	Kota Serang	61,24
89	Kota Padang Sidimpuan	60,72
90	Kota Banjar	60,63
91	Kota Prabumulih	60,17
92	Kota Tidore Kepulauan	58,48
93	Kota Tanjung Balai	54,30
94	Kota Lubuklinggau	53,91
95	Kota Pagar Alam	47,09
96	Kota Gunungsitoli	45,67
97	Kota Tual	41,83
98	Kota Subulussalam	27,85

Perubahan Skor Kabupaten/Kota

Perubahan skor dilihat dengan membandingkan skor IKP tahun 2020 dengan IKP 2021 pada 416 kabupaten dan 98 kota. Secara total, sebanyak 311 kabupaten/kota (60,51%) mengalami peningkatan skor dan 203 kabupaten/kota (39,49%) mengalami penurunan skor. Perubahan skor setiap kabupaten/kota disajikan dalam Gambar 3.

Gambar 3.
Perubahan Skor Kabupaten/Kota antara IKP 2020 dan IKP 2021
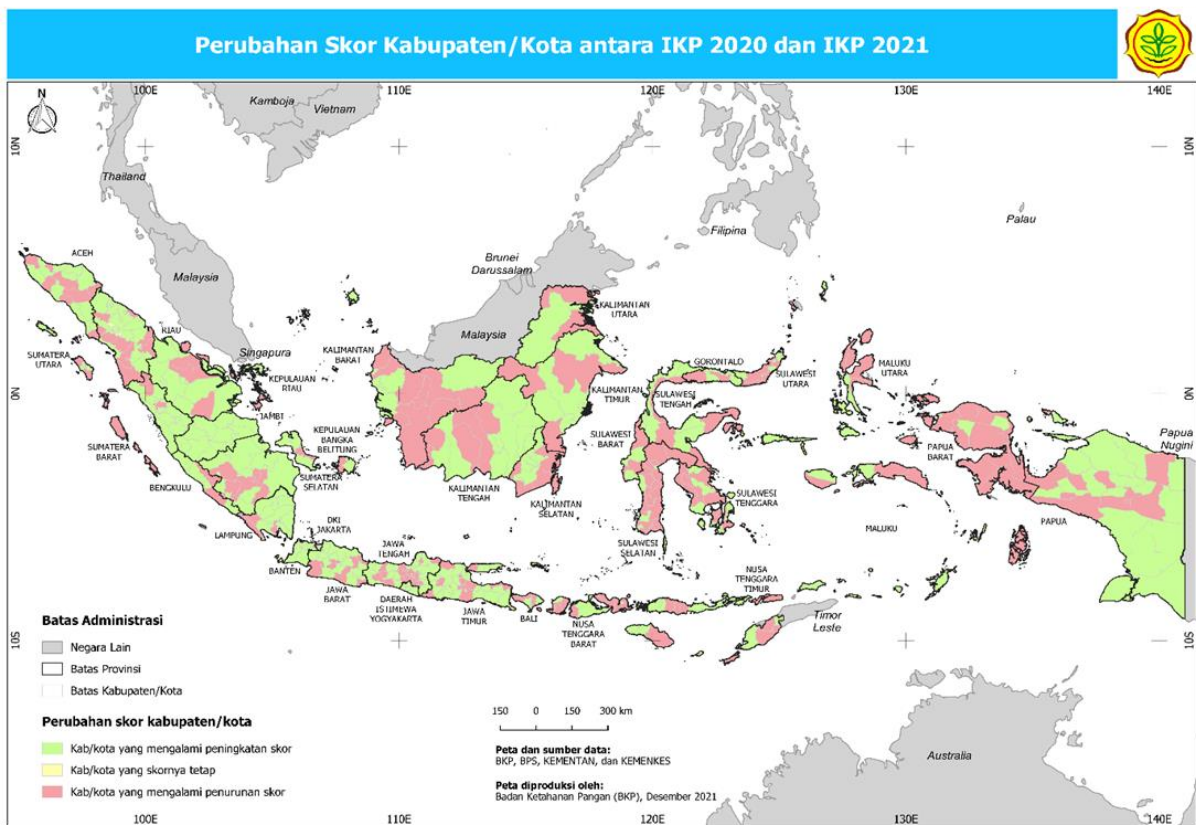
Pada wilayah kabupaten, sebanyak 230 kabupaten (55,29%) mengalami peningkatan skor dan 186 kabupaten (44,71%) mengalami penurunan skor. Sedangkan untuk wilayah perkotaan, 81 kota (82,65%) mengalami peningkatan skor dan 17 kota (17,35%) mengalami penurunan skor. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan skor IKP lebih banyak terjadi di perkotaan. Secara rinci, distribusi perubahan skor di tingkat kabupaten dan kota disajikan dalam Gambar 4.

Gambar 4.
Distribusi Perubahan Skor Kabupaten dan Kota
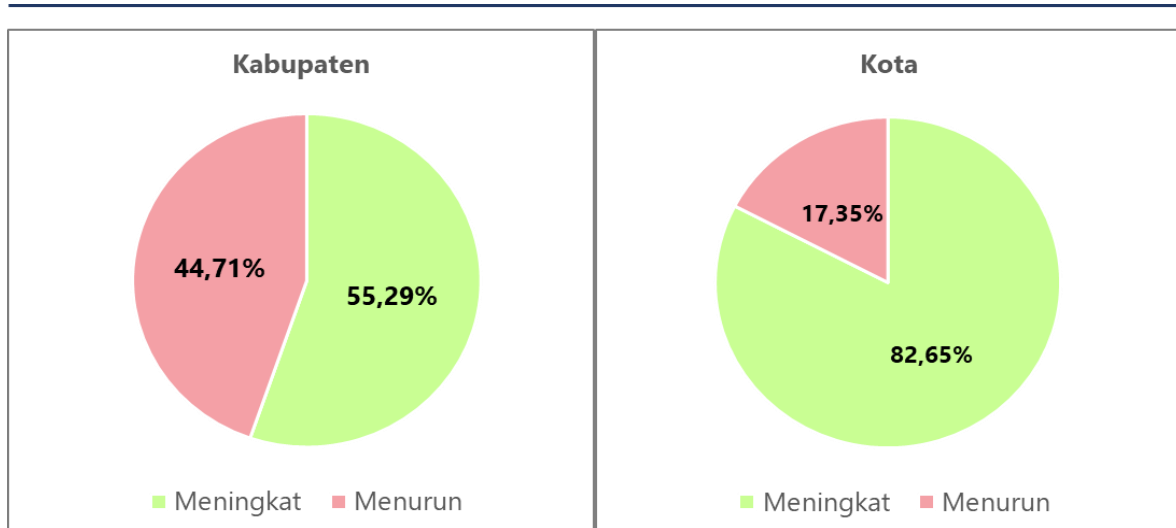
Hasil Analisis Provinsi

Wilayah provinsi juga dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP provinsi. Pada IKP 2021, sebanyak 2 provinsi atau 5,88% dari 34 provinsi memiliki skor IKP yang rendah dengan sebaran sebagai berikut: 1 provinsi Prioritas 1 yaitu Papua, dan 1 provinsi Prioritas 2 yaitu Papua Barat. Sebaran IKP provinsi berdasarkan hasil pengelompokan disajikan dalam Gambar 5.

Gambar 5.
Peta Indeks Ketahanan Pangan Provinsi 2021
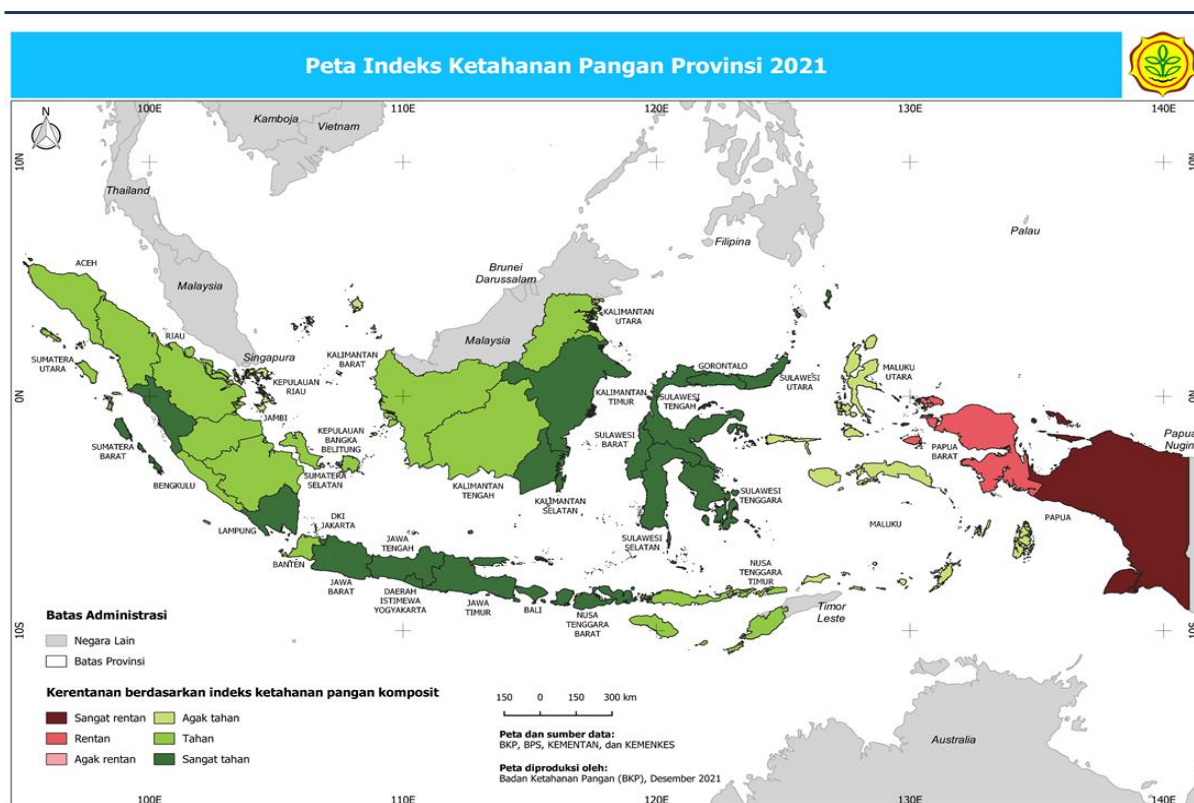
Berdasarkan peringkat IKP Provinsi, lima provinsi dengan urutan skor terbaik adalah Bali (83,82), Jawa Tengah (82,73), DI Yogyakarta (81,43), Sulawesi Selatan (80,82), dan Gorontalo (80,52). Sedangkan lima provinsi dengan urutan skor terendah, yaitu Papua (35,48), Papua Barat (46,05), Maluku (58,70), Maluku Utara (59,58), dan Kepulauan Riau (63,26). Peringkat dan IKP provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6.
Peringkat dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi 2021

Peringkat	Provinsi	IKP
1	Bali	83,82
2	Jawa Tengah	82,73
3	DI Yogyakarta	81,43
4	Sulawesi Selatan	80,82
5	Gorontalo	80,52
6	Kalimantan Selatan	80,29
7	Jawa Timur	79,70
8	Sumatera Barat	79,55
9	Sulawesi Utara	78,30
10	DKI Jakarta	78,01
11	Lampung	77,96
12	Jawa Barat	77,79
13	Kalimantan Timur	77,46
14	Sulawesi Tenggara	76,64
15	Sulawesi Tengah	75,73
16	Nusa Tenggara Barat	75,67
17	Sulawesi Barat	75,49
18	Banten	74,38
19	Jambi	74,18
20	Kalimantan Tengah	73,68
21	Kep. Bangka Belitung	73,22
22	Kalimantan Utara	73,02
23	Sumatera Utara	72,25
24	Aceh	71,63
25	Kalimantan Barat	71,32
26	Bengkulu	70,32
27	Sumatera Selatan	69,55
28	Nusa Tenggara Timur	67,35
29	Riau	66,84
30	Kepulauan Riau	63,26
31	Maluku Utara	59,58
32	Maluku	58,70
33	Papua Barat	46,05
34	Papua	35,48

Perubahan Skor Provinsi

Perubahan skor provinsi juga dilihat dengan membandingkan kondisi 34 provinsi dari IKP 2020 dan IKP 2021. Perubahan skor setiap provinsi disajikan dalam Gambar 6.

Gambar 6.
Perubahan Skor Provinsi antara IKP 2020 dan IKP 2021
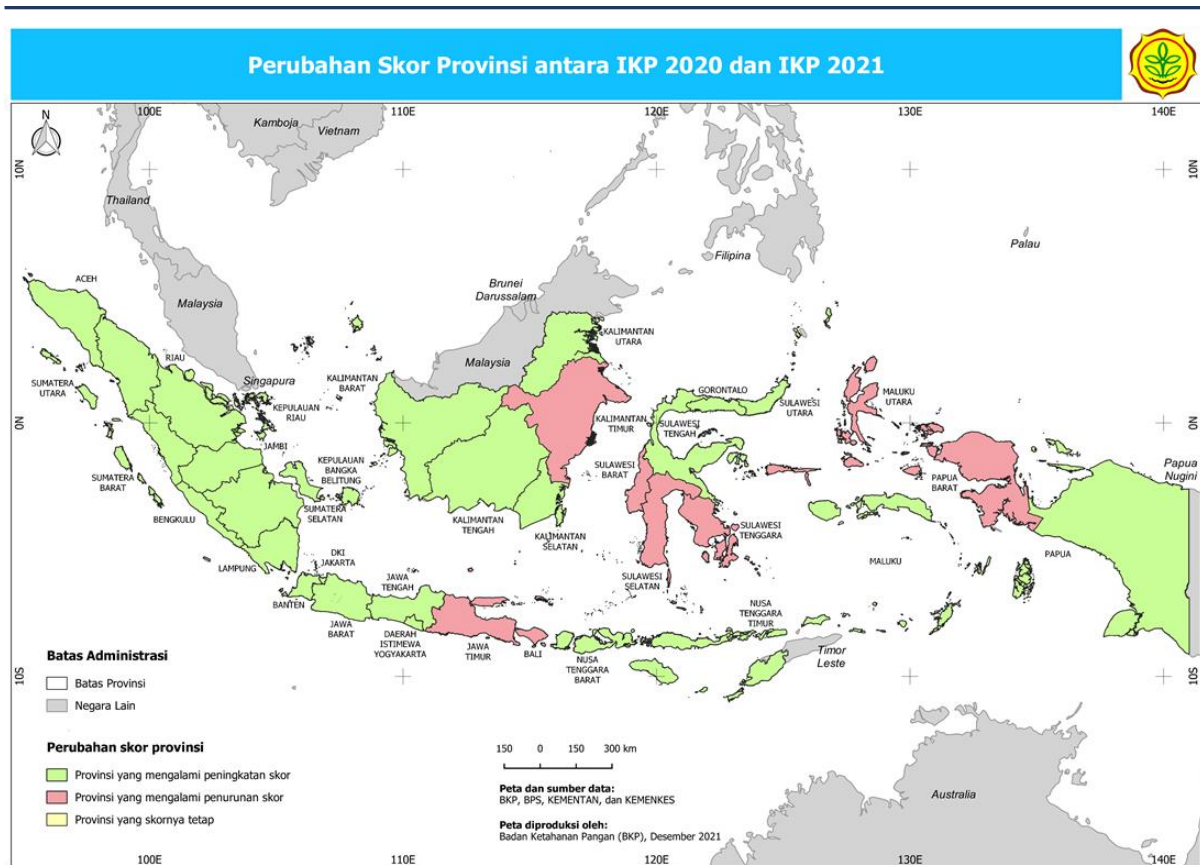
Sebanyak 26 provinsi (76,47%) mengalami peningkatan skor dan delapan provinsi (23,53%) mengalami penurunan skor. Sebaran provinsi yang mengalami perubahan skor disajikan dalam Gambar 7.

Gambar 7.
Distribusi Perubahan Skor Provinsi
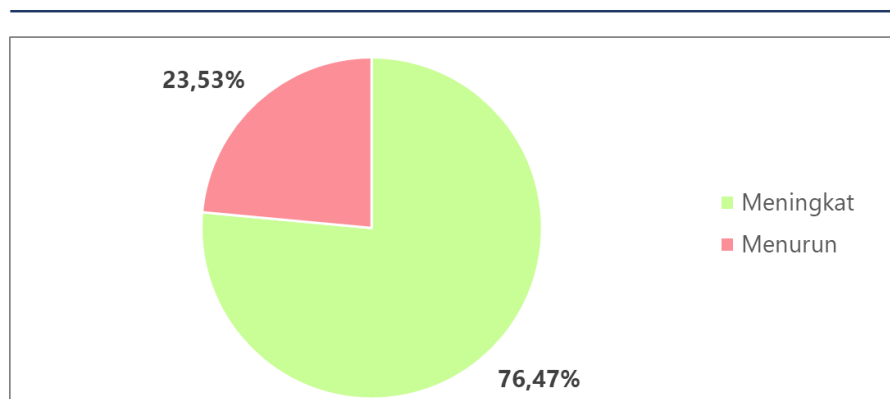
Kesimpulan

1. IKP 2021 menunjukkan bahwa terdapat 74 kabupaten/kota dengan rincian 70 kabupaten (16,83%) dari 416 kabupaten, 4 kota (4%) dari 98 kota masuk dalam kategori IKP rendah.
2. IKP Provinsi menunjukkan terdapat dua provinsi (5,88%) yaitu Papua dan Papua Barat masuk dalam IKP rendah.
3. Wilayah Indonesia bagian timur secara umum memiliki nilai IKP lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian barat, sehingga perlu mendapatkan prioritas penanganan kerentanan pangan yang komprehensif.
4. Peningkatan skor IKP Kabupaten/Kota terjadi 311 kabupaten/kota (60,51%). Peningkatan skor IKP provinsi terjadi di 26 provinsi (76,47%).
5. Sinergi lintas sektor dari pusat dan daerah serta kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan dalam pembangunan sistem pangan berkelanjutan. Fokus dan pendalaman pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dan gizi diperlukan guna pencapaian SDGs, terutama tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan) dan tujuan 2 (Tanpa Kelaparan).

Referensi

Azwar A. 2004. Aspek Kesehatan dan Gizi dalam Ketahanan Pangan. Dalam Prosiding Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi VIII: Ketahanan Pangan dan Gizi di Era Otonomi Daerah dan Globalisasi. Jakarta: BPS, Departemen Kesehatan, Badan POM, Bappenas, Departemen Pertanian dan Ristek

Deaton A., and J. Muellbaeuer. 1980. Economics and Consumer Behavior. London: Cambridge University Press.

[DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2013. *Panduan Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia*. Jakarta (ID): Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.

[DKP dan WFP] Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme. 2015. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia 2015*. Jakarta: Dewan Ketahanan Pangan dan World Food Programme.

[EIU] The Economist Intelligence Unit. 2020. Global Food Security Index 2020. Building Resilience in the Face of Rising Food-Security Risks. Dupont (GB): London.

[EIU] The Economist Intelligence Unit (EIU). 2021. Global Food Security Index 2021. Diakses pada 21 November 2021 dari https://impact.economist.com/sustainability/project/food-security-index/

[FAO] Food Agriculture Organization. 2015. The causes of food insecurity in rural areas. http://www.fao.org/docrep/003/x8406e/ X8406e02.htm.

[IFPRI] International Food Policy Research Institute. 2014. Global Hunger Index: The Inequalities of Hunger. Washington DC (US): IFPRI.

Goodridge P. 2007. Method explained index number, economic and labour. *Market Review*. 1(3): 54-57.

Kavosi E, Rostami ZH, Kavosi Z, Nasihatkon A, Moghadami M, Heidari M. 2014. Prevalence and determinants of under-nutrition among children under six: a cross-sectional survey in fars province. Int J Health Policy Manag. 3(2):71-76.

Khan REA and Gill AR. 2009. Determinants of food securityin ruralareas of Pakistan. *MPRA Paper* No. 17146.

Lubis R. 2010. Analisis wilayah rawan pangan dan gizi dalam perspektif perencanaan wilayah (studi kasus Bogor). Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Mahmood S., Sheikh KH, Mahmood T and Malik MH. 1991. Food poverty and its causes in Pakistan. *The Pakistan Development Review*. 30(4):821-834.

Nurdin Rahman, Muhammad Ryman Napirah, Devi Nadila and Bohari. 2017. Determinants of Stunting among Children in Urban Families in Palu, Indonesia. *Pakistan Journal of Nutrition, 16: 750-756*.

[Pemprov NTT, DKP, WFP] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme. 2015. *Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur 2015*. Jakarta: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dewan Ketahanan Pangan, dan World Food Programme.

Sánchez MV dan Sbrana G. 2010. Determinants of education attainment and development goals in Yemen. UNDP/UN-DESA/World Bank project

Schultz P. 1999. Helath and schooling investments in Africa. Journal of Economic Perspectives, 13 (3): 67-88

Sabarella. 2005. Model persamaan struktural kerawanan pangan. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Sofiati EL. 2010. Analisis kerawanan pangan di tingkat kecamatan Bogor. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Suhardjo. 1996. Pengertian dan kerangka pikir ketahanan pangan rumah tangga. Makalah disampaikan pada Lokakarya Ketahanan Pangan Rumah Tangga, 20 – 30 Mei 1996, Yogyakarta.

Syngenta and Frontier Strategy Group. 2016. Rice Bowl Index 2016: Collective Responsibility. Singapore: Syngenta Asia Pacific Pte Ltd and Frontier Strategy Group.

Thomas D and Strauss J. 1992. Prices, infrastructure, household characteristics and child height. *J Dev Econ*. 39(2):301-331.

Torlesse H, Cronin AA,Sebayang SK,and Nandy R. 2016. Determinants of stunting in Indonesian children: evidence from a cross-sectional survey indicate a prominent role for the water, sanitation and hygiene sector in stunting reduction. BMC Public 16:669

[WHO] World Health Organization. 2000. Classification of severity of malnutrition in a community for children under 5 years of age from the management of nutrition in major emergencies. Genewa: WHO.

Wiranthi PE, Suwarsinah HK and Adhi AK. 2002. Determinants of household food security: a comparative analysis of Eastern and Western Indonesia. *Indones J Agric Sci*.15(1):17-28.

Lampiran

Lampiran 1.

Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kabupaten Tahun 2021

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
	Aceh								
1	Simeulue	77,15	70,13	70,60	72,43	81,41	69,11	72,87	74,30
2	Aceh Singkil	20,85	67,18	66,82	53,14	16,68	67,46	66,82	51,97
3	Aceh Selatan	85,08	72,13	61,88	71,92	90,20	74,34	65,47	75,55
4	Aceh Tenggara	95,95	70,65	59,93	73,95	97,44	73,25	62,52	76,22
5	Aceh Timur	90,09	69,34	65,67	74,10	92,33	73,44	65,86	76,08
6	Aceh Tengah	70,20	76,88	67,37	71,07	55,06	76,37	67,19	66,31
7	Aceh Barat	86,98	74,73	75,25	78,61	90,39	71,31	73,67	77,98
8	Aceh Besar	93,27	75,58	83,34	83,99	93,96	75,57	80,59	83,09
9	Pidie	94,54	64,38	67,23	74,57	95,33	64,35	68,72	75,39
10	Bireuen	91,56	74,59	73,96	79,43	95,11	75,57	72,71	80,29
11	Aceh Utara	95,55	67,07	68,52	76,20	96,25	69,31	69,28	77,38
12	Aceh Barat Daya	93,84	71,64	67,40	76,60	94,47	70,27	67,21	76,31
13	Gayo Lues	90,71	69,00	66,91	74,68	92,85	66,53	64,93	73,79
14	Aceh Tamiang	86,26	74,79	76,68	78,99	87,46	77,19	73,55	78,81
15	Nagan Raya	85,41	71,29	69,97	75,00	87,21	72,13	74,02	77,41
16	Aceh Jaya	95,13	75,23	70,79	79,42	96,49	75,83	70,64	79,95

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
17	Bener Meriah	0,00	68,94	72,31	49,60	0,00	70,11	72,35	49,97
18	Pidie Jaya	95,24	66,26	73,02	77,66	96,31	63,68	73,10	77,24
	Sumatera Utara								
19	Nias	85,71	66,19	43,18	62,84	88,19	67,54	46,43	65,29
20	Mandailing Natal	84,83	74,08	51,74	68,37	82,59	75,91	49,40	67,31
21	Tapanuli Selatan	91,69	76,27	61,05	74,81	91,45	79,43	57,25	74,16
22	Tapanuli Tengah	74,67	74,66	63,33	70,13	71,97	75,14	65,15	70,19
23	Tapanuli Utara	94,45	74,57	67,85	77,84	95,94	76,97	64,57	77,70
24	Toba Samosir	96,84	78,32	70,64	80,80	96,32	78,97	71,70	81,27
25	Labuhan Batu	77,55	85,01	72,44	77,75	74,31	84,60	67,00	74,48
26	Asahan	62,24	82,91	73,91	73,11	62,78	84,96	74,46	74,10
27	Simalungun	92,63	80,89	70,71	80,34	92,86	83,15	72,41	81,77
28	Dairi	94,64	77,71	65,40	77,86	95,69	80,96	69,27	80,71
29	Karo	97,55	76,36	77,98	83,37	98,31	77,87	75,90	83,22
30	Deli Serdang	80,41	90,20	82,80	84,30	86,39	91,52	80,73	85,66
31	Langkat	80,34	80,21	75,58	78,40	82,53	82,41	73,30	78,80
32	Nias Selatan	87,39	66,69	48,48	65,62	83,80	64,26	47,81	63,54
33	Humbang Hasundutan	95,06	76,83	64,30	77,29	94,28	75,87	61,17	75,51
34	Pakpak Bharat	85,18	79,50	55,63	71,65	84,87	79,50	54,51	71,12
35	Samosir	95,20	72,66	63,91	75,92	93,72	75,12	67,37	77,60
36	Serdang Bedagai	97,81	85,01	70,47	83,03	98,18	83,46	71,84	83,23
37	Batu Bara	82,02	78,98	70,67	76,57	83,49	79,38	68,23	76,15

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
38	Padang Lawas Utara	70,75	77,59	58,72	67,99	76,53	77,29	56,03	68,56
39	Padang Lawas	74,51	80,06	58,65	69,83	73,59	80,14	59,68	69,99
40	Labuhan Batu Selatan	0,00	85,70	72,67	54,78	0,00	86,20	70,72	54,15
41	Labuhan Batu Utara	73,98	79,45	67,66	73,09	76,73	83,34	66,17	74,49
42	Nias Utara	91,93	58,31	57,57	68,10	87,60	57,58	57,62	66,60
43	Nias Barat	72,36	54,49	46,09	56,49	88,11	55,96	45,18	61,29
	Sumatera Barat								
44	Kepulauan Mentawai	25,98	63,86	49,29	46,67	0,00	63,40	46,61	37,67
45	Pesisir Selatan	94,11	84,88	77,38	84,65	94,42	85,86	78,48	85,48
46	Solok	93,87	80,95	67,82	79,57	94,08	81,86	67,03	79,59
47	Sijunjung	84,50	86,12	66,66	77,85	88,78	85,57	66,43	78,88
48	Tanah Datar	95,75	86,32	75,66	84,88	95,76	86,12	75,28	84,68
49	Padang Pariaman	92,60	84,14	69,93	80,99	92,74	84,64	73,21	82,50
50	Agam	93,62	85,76	75,73	84,10	93,73	84,32	77,66	84,48
51	Limapuluh Koto	93,48	82,89	68,77	80,42	94,07	83,53	68,45	80,66
52	Pasaman	95,98	81,49	66,23	79,73	96,17	82,03	65,28	79,57
53	Solok Selatan	95,34	84,68	67,50	81,00	95,76	84,78	71,76	82,87
54	Dharmas Raya	75,96	89,89	70,95	78,13	81,08	88,75	74,19	80,62
55	Pasaman Barat	92,17	81,58	65,56	78,35	94,08	82,64	67,52	80,02
	Riau								
56	Kuantan Sengingi	44,90	84,16	72,84	67,85	59,82	85,26	72,78	72,64

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
57	Indragiri Hulu	30,20	90,47	75,94	66,58	23,73	92,11	74,78	64,66
58	Indragiri Hilir	72,46	83,67	51,62	67,48	73,75	85,94	53,11	69,15
59	Pelalawan	12,28	82,61	80,10	60,51	29,97	84,98	79,18	66,16
60	Siak	53,49	93,26	82,74	77,12	57,40	90,10	81,47	76,84
61	Kampar	0,00	86,54	73,87	55,51	18,07	88,22	74,74	61,78
62	Rokan Hulu	0,00	81,95	71,64	53,24	1,25	83,16	74,00	54,92
63	Bengkalis	34,98	89,46	71,54	65,95	15,05	89,92	74,15	61,15
64	Rokan Hilir	43,24	86,85	69,02	66,63	46,41	85,92	69,45	67,48
65	Kepulauan Meranti	0,08	64,98	45,15	37,58	0,00	64,58	46,87	38,12
	Jambi								
66	Kerinci	94,04	85,62	68,90	81,46	94,70	86,45	72,41	83,31
67	Merangin	70,85	83,45	66,25	72,79	80,29	83,38	70,32	77,23
68	Sarolangun	54,54	82,81	67,81	68,33	60,39	84,41	68,45	70,82
69	Batang Hari	44,87	80,68	69,67	65,53	69,80	80,11	71,36	73,52
70	Muaro Jambi	10,99	87,95	77,11	60,53	50,62	89,92	76,58	72,79
71	Tanjung Jabung Timur	83,33	78,86	52,84	69,79	88,49	80,03	54,13	72,21
72	Tanjung Jabung Barat	67,15	76,76	59,37	66,92	69,39	78,03	60,79	68,54
73	Tebo	51,39	86,04	67,74	68,33	66,90	85,46	67,55	72,73
74	Bungo	43,77	88,83	73,19	69,06	55,54	89,39	68,04	70,69
	Sumatera Selatan								
75	Ogan Komering Ulu	74,35	79,87	69,92	74,23	77,16	77,90	71,04	74,93

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
76	Ogan Komering Ilir	95,01	76,32	61,81	76,12	96,56	74,15	64,00	76,81
77	Muara Enim	76,67	79,67	64,48	72,70	69,30	82,68	64,85	71,54
78	Lahat	81,42	74,99	59,07	70,55	80,69	72,87	56,96	68,85
79	Musi Rawas	89,75	79,62	66,80	77,53	93,46	76,28	61,02	75,33
80	Musi Banyuasin	86,32	76,97	65,12	75,03	89,96	77,44	67,63	77,27
81	Banyuasin	98,01	79,96	61,27	77,90	98,88	79,67	61,83	78,30
82	Ogan Komering Ulu Selatan	95,17	75,06	56,99	73,86	95,41	71,55	60,53	74,30
83	Ogan Komering Ulu Timur	97,59	86,12	65,26	81,22	98,45	83,39	64,88	80,50
84	Ogan Ilir	80,15	79,01	65,20	73,83	84,73	74,39	60,00	71,74
85	Empat Lawang	86,63	72,45	45,07	65,75	85,85	74,37	45,03	66,07
86	Penukal Abab Lematang Ilir	68,23	79,41	64,73	70,18	74,26	82,02	61,05	71,31
87	Musi Rawas Utara	22,00	68,56	56,33	49,70	58,11	67,17	56,86	60,33
	Bengkulu								
88	Bengkulu Selatan	95,18	68,97	63,24	74,54	94,06	68,94	58,50	72,30
89	Rejang Lebong	80,03	75,68	59,81	70,64	73,90	75,07	57,13	67,54
90	Bengkulu Utara	71,12	81,13	56,19	68,15	68,63	79,29	59,58	68,21
91	Kaur	86,72	70,84	58,54	70,68	89,14	70,44	60,63	72,12
92	Seluma	87,79	70,77	50,38	67,72	86,46	70,90	50,20	67,29
93	Mukomuko	77,71	82,75	58,29	71,46	85,36	80,09	66,33	76,17
94	Lebong	94,21	75,01	63,31	76,09	93,38	75,57	59,25	74,38
95	Kepahiang	80,49	76,87	54,47	68,99	75,95	73,89	59,33	68,68
96	Bengkulu Tengah	59,78	83,27	60,81	67,24	68,29	82,30	58,62	68,63

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
	Lampung								
97	Lampung Barat	83,92	80,00	62,12	74,02	84,45	77,08	55,85	70,80
98	Tanggamus	84,27	77,82	65,09	74,67	87,76	79,21	63,13	75,34
99	Lampung Selatan	95,33	76,30	69,34	79,23	96,67	76,48	69,29	79,66
100	Lampung Timur	98,57	78,37	66,04	79,50	99,05	77,78	70,37	81,20
101	Lampung Tengah	98,11	79,78	66,16	79,83	99,19	80,90	65,34	80,16
102	Lampung Utara	98,12	67,21	54,79	71,51	98,70	69,78	56,13	73,00
103	Way Kanan	94,20	77,46	54,62	73,34	96,87	76,49	57,37	74,96
104	Tulang Bawang	97,78	85,87	69,33	82,83	98,94	85,59	73,06	84,58
105	Pesawaran	95,37	76,96	71,12	80,15	96,00	74,27	69,71	78,96
106	Pringsewu	91,24	82,75	78,99	83,79	92,96	81,80	79,06	84,05
107	Mesuji	98,40	88,66	68,85	83,66	99,48	89,67	72,14	85,60
108	Tulang Bawang Barat	98,17	87,28	54,87	77,58	98,84	86,39	57,53	78,58
109	Pesisir Barat	93,07	72,22	58,35	72,93	93,98	71,73	54,72	71,60
	Kep. Bangka Belitung								
110	Bangka	65,64	91,21	80,61	79,30	72,11	92,98	79,05	81,15
111	Belitung	0,00	93,40	82,82	61,15	0,00	91,96	83,36	60,93
112	Bangka Barat	48,65	94,70	73,81	72,53	68,18	95,38	73,78	78,58
113	Bangka Tengah	0,00	92,01	80,49	59,80	0,00	91,62	78,45	58,87
114	Bangka Selatan	82,60	91,41	71,72	80,89	89,76	89,17	70,64	81,93
115	Belitung Timur	0,00	91,65	83,61	60,94	19,32	90,45	83,98	66,52

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
	Kepulauan Riau								
116	Karimun	0,00	90,34	77,97	58,29	0,00	88,88	78,65	58,12
117	Bintan	0,00	92,78	73,68	57,31	0,00	91,98	78,07	58,82
118	Natuna	0,00	91,24	70,82	55,70	0,00	91,95	75,14	57,64
119	Lingga	0,00	79,91	66,24	50,47	0,00	75,65	59,14	46,35
120	Kepulauan Anambas	0,00	90,20	65,61	53,31	0,00	89,73	66,47	53,51
	DKI Jakarta								
121	Kep. Seribu	0,00	67,81	78,85	51,88	0,00	64,24	80,30	51,39
	Jawa Barat								
122	Bogor	43,84	86,55	68,80	66,64	50,35	85,51	70,37	68,90
123	Sukabumi	86,58	80,99	67,27	77,18	87,94	81,38	63,79	76,31
124	Cianjur	89,40	78,63	64,46	76,19	89,06	79,19	66,84	77,21
125	Bandung	69,28	85,28	81,78	79,08	68,74	86,01	82,45	79,41
126	Garut	91,64	75,72	66,04	76,62	92,37	74,30	66,30	76,52
127	Tasikmalaya	88,27	74,54	61,08	73,28	88,95	73,90	64,13	74,51
128	Ciamis	87,87	82,70	70,11	79,21	88,37	82,20	72,11	80,01
129	Kuningan	88,96	76,47	75,94	80,01	90,49	73,36	79,27	80,86
130	Cirebon	85,09	79,43	75,81	79,68	85,14	77,41	75,19	78,84
131	Majalengka	94,30	77,40	73,78	81,02	94,53	74,87	74,94	80,79
132	Sumedang	92,82	79,64	74,31	81,46	92,91	80,51	79,25	83,73
133	Indramayu	96,57	74,42	77,18	82,17	96,92	74,23	79,30	83,07

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
134	Subang	95,01	82,27	73,69	82,66	95,91	82,69	73,08	82,81
135	Purwakarta	79,30	85,49	73,09	78,67	81,41	85,27	72,83	79,14
136	Karawang	93,38	84,44	77,92	84,51	93,56	85,65	79,65	85,63
137	Bekasi	75,48	89,88	85,62	83,86	78,93	90,68	88,51	86,29
138	Bandung Barat	72,60	79,16	75,57	75,76	71,72	77,02	73,89	74,18
139	Pangandaran	92,86	81,80	73,99	81,99	92,27	81,06	71,61	80,64
	Jawa Tengah								
140	Cilacap	92,95	83,06	78,09	84,04	93,67	82,84	78,19	84,23
141	Banyumas	80,03	82,69	79,17	80,48	81,68	80,53	78,27	79,97
142	Purbalingga	83,63	78,55	78,74	80,15	85,43	76,47	76,90	79,33
143	Banjarnegara	83,95	78,21	74,52	78,45	83,22	76,75	77,49	78,99
144	Kebumen	91,54	74,28	76,66	80,41	89,72	73,40	74,06	78,56
145	Purworejo	92,57	82,69	75,67	82,85	92,60	79,11	79,40	83,28
146	Wonosobo	84,96	74,91	76,55	78,58	87,18	73,34	79,19	79,83
147	Magelang	82,67	84,78	77,60	81,27	80,54	81,54	78,25	79,92
148	Boyolali	91,88	86,28	79,76	85,35	91,32	85,83	79,99	85,14
149	Klaten	90,27	81,21	81,47	84,03	89,98	78,31	77,78	81,60
150	Sukoharjo	92,14	87,96	86,81	88,76	91,84	89,13	86,01	88,70
151	Wonogiri	97,43	82,77	81,21	86,55	98,16	82,63	84,50	88,04
152	Karanganyar	90,72	84,67	86,50	87,22	90,83	84,39	87,65	87,63
153	Sragen	97,33	80,75	81,96	86,21	97,42	81,87	84,40	87,55
154	Grobogan	96,65	75,60	80,02	83,68	97,38	76,40	83,14	85,39

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
155	Blora	96,85	80,50	80,66	85,47	97,63	79,08	82,14	85,87
156	Rembang	92,03	77,03	82,57	83,75	92,65	73,87	82,79	83,07
157	Pati	96,75	85,82	83,70	88,25	97,59	84,62	84,29	88,38
158	Kudus	87,50	92,48	82,28	86,91	86,36	89,37	84,92	86,69
159	Jepara	86,71	85,22	80,81	83,90	90,07	88,25	78,72	84,98
160	Demak	95,26	78,39	82,36	85,04	95,74	80,09	82,69	85,82
161	Semarang	83,02	90,47	86,61	86,69	86,35	88,37	85,33	86,55
162	Temanggung	81,09	86,45	79,76	82,16	77,90	86,03	81,28	81,69
163	Kendal	89,68	84,58	82,41	85,24	89,09	83,84	83,25	85,18
164	Batang	86,86	82,79	75,96	81,28	87,27	84,28	78,79	82,98
165	Pekalongan	85,69	81,46	71,78	78,86	84,00	80,98	74,59	79,33
166	Pemalang	89,94	73,45	75,44	79,19	89,42	72,64	74,33	78,35
167	Tegal	86,06	84,10	75,89	81,41	88,10	86,00	73,92	81,80
168	Brebes	87,36	73,56	68,63	75,73	89,28	74,48	69,47	76,91
	DI Yogyakarta								
169	Kulon Progo	88,78	74,63	78,22	80,31	88,30	72,45	83,09	81,46
170	Bantul	73,23	83,60	81,69	79,73	75,59	79,77	83,63	80,06
171	Gunung Kidul	97,21	70,92	74,69	80,32	98,06	69,33	75,35	80,36
172	Sleman	66,16	90,38	88,35	82,30	70,95	88,71	88,72	83,39
	Jawa Timur								
176	Tulungagung	91,45	88,42	76,51	84,56	91,79	87,27	78,58	85,15

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
177	Blitar	91,39	86,55	76,07	83,81	91,32	85,89	76,67	83,83
178	Kediri	85,50	81,51	72,72	79,19	86,62	81,80	75,29	80,64
179	Malang	82,12	83,87	79,52	81,60	81,48	83,56	75,83	79,85
180	Lumajang	91,07	80,10	65,55	77,57	91,38	80,07	68,15	78,70
181	Jember	89,77	80,52	61,57	75,72	90,37	78,89	64,79	76,70
182	Banyuwangi	89,83	88,82	72,00	82,40	91,20	86,59	73,66	82,80
183	Bondowoso	92,54	72,26	60,59	73,68	93,65	71,51	63,36	74,89
184	Situbondo	92,87	77,31	67,09	77,89	93,89	74,22	67,86	77,58
185	Probolinggo	86,32	68,22	58,40	69,72	88,14	66,64	58,42	69,80
186	Pasuruan	86,17	83,35	68,52	78,26	83,16	82,17	68,52	77,01
187	Sidoarjo	65,34	92,58	90,11	83,42	65,03	92,66	90,65	83,57
188	Mojokerto	91,84	84,71	82,40	85,92	92,29	81,90	80,51	84,46
189	Jombang	91,00	83,13	77,97	83,43	91,61	81,69	79,30	83,71
190	Nganjuk	94,00	77,76	76,14	81,98	94,88	76,97	76,53	82,17
191	Madiun	95,80	81,66	79,40	85,00	96,33	82,50	78,01	84,85
192	Magetan	94,23	84,30	83,28	86,87	95,79	83,75	83,07	87,09
193	Ngawi	97,79	75,88	77,25	83,00	98,56	74,61	79,77	83,86
194	Bojonegoro	95,82	78,56	78,55	83,73	96,67	77,10	80,67	84,40
195	Tuban	96,16	76,51	79,41	83,57	96,97	73,28	79,82	83,00
196	Lamongan	96,87	79,34	81,90	85,62	97,19	78,58	82,68	85,80
197	Gresik	89,89	84,79	89,03	88,02	91,62	84,56	88,49	88,25
198	Bangkalan	91,03	66,76	67,18	74,21	90,85	63,75	69,14	74,04

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
199	Sampang	90,10	60,18	67,50	72,08	92,43	57,07	68,27	72,16
200	Pamekasan	83,93	71,84	69,36	74,48	86,32	72,52	71,32	76,18
201	Sumenep	93,80	64,29	67,31	74,35	94,06	63,66	72,13	76,17
	Banten								
202	Pandeglang	91,52	78,53	53,93	72,59	92,16	79,53	54,71	73,39
203	Lebak	88,26	76,76	53,19	70,78	90,07	78,64	54,96	72,60
204	Tangerang	49,79	87,84	77,94	72,47	65,42	87,27	75,65	76,07
205	Serang	85,29	85,97	64,22	77,07	86,66	87,55	63,60	77,70
	Bali								
206	Jembrana	84,23	87,06	77,94	82,56	78,43	88,31	81,21	82,51
207	Tabanan	91,13	93,74	86,49	90,05	90,39	94,37	86,84	90,17
208	Badung	73,52	99,59	93,38	89,29	78,62	96,95	91,76	89,38
209	Gianyar	82,46	97,49	89,94	89,96	81,40	95,03	91,33	89,46
210	Klungkung	84,95	91,04	81,39	85,35	78,96	90,61	79,84	82,80
211	Bangli	55,75	91,87	74,02	73,89	49,47	89,13	71,16	70,04
212	Karangasem	68,32	90,08	76,82	78,25	81,45	88,52	73,11	80,24
213	Buleleng	70,80	89,30	75,33	78,16	63,85	85,54	77,43	75,79
	Nusa Tenggara Barat								
214	Lombok Barat	85,43	77,06	67,93	75,92	85,51	78,38	63,84	74,70
215	Lombok Tengah	92,51	78,93	64,18	77,10	91,68	78,34	62,37	75,95
216	Lombok Timur	88,32	73,06	62,70	73,50	86,50	74,71	61,24	72,86

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
217	Sumbawa	98,61	79,83	71,96	82,31	98,69	80,31	71,55	82,32
218	Dompu	98,73	83,38	66,32	81,16	99,00	81,96	63,69	79,76
219	Bima	97,19	79,01	66,71	79,54	97,07	76,37	63,66	77,49
220	Sumbawa Barat	96,60	80,01	73,38	82,33	96,44	81,22	72,40	82,26
221	Lombok Utara	88,94	55,14	57,87	66,37	89,83	58,97	60,06	68,67
	Nusa Tenggara Timur								
222	Sumba Barat	91,02	44,50	57,76	63,76	86,76	49,91	59,06	64,63
223	Sumba Timur	91,96	52,92	58,03	66,68	90,83	50,83	59,29	66,21
224	Kupang	87,41	56,83	57,09	66,11	86,79	58,28	57,24	66,42
225	Timor Tengah Selatan	89,70	42,01	52,70	60,59	89,09	41,01	51,20	59,51
226	Timor Tengah Utara	89,73	52,99	64,49	68,61	83,66	55,20	62,04	66,47
227	Belu	87,58	68,89	60,29	71,06	89,32	69,84	60,37	71,89
228	Alor	79,92	56,75	55,74	63,30	79,19	57,58	49,46	60,82
229	Lembata	80,94	56,15	62,63	66,18	92,12	56,81	64,36	70,43
230	Flores Timur	71,96	73,23	65,00	69,56	75,82	77,02	66,26	72,36
231	Sikka	84,36	70,16	66,12	72,81	83,78	71,25	67,58	73,54
232	Ende	74,52	60,49	70,49	68,70	80,22	59,40	69,04	69,50
233	Ngada	93,86	74,05	74,67	80,24	93,10	74,13	74,25	79,87
234	Manggarai	88,76	61,11	66,84	71,70	90,33	61,93	65,50	71,88
235	Rote Ndao	87,38	52,64	65,52	68,21	83,93	51,92	64,15	66,41
236	Manggarai Barat	94,06	62,60	60,14	71,05	95,50	66,54	58,26	71,92
237	Sumba Tengah	94,06	39,49	53,88	61,62	93,81	40,99	53,76	61,94

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
238	Sumba Barat Daya	88,81	38,62	45,66	56,49	92,11	36,80	48,22	57,96
239	Nagekeo	90,39	71,79	64,98	74,64	89,08	76,15	62,05	74,39
240	Manggarai Timur	91,08	43,39	63,10	65,58	91,10	38,49	57,16	61,74
241	Sabu Raijua	41,31	39,15	46,51	42,74	56,01	47,10	50,25	51,03
242	Malaka	91,64	64,92	54,80	68,89	93,58	66,16	47,90	67,08
	Kalimantan Barat								
243	Sambas	90,11	85,28	43,56	70,04	87,27	84,94	41,25	68,16
244	Bengkayang	94,16	83,73	69,51	81,17	92,90	86,18	64,56	79,55
245	Landak	92,59	73,82	56,45	72,50	92,94	77,69	60,10	75,23
246	Mempawah	87,74	85,12	55,55	74,08	87,47	89,71	53,01	74,36
247	Sanggau	88,17	88,63	62,90	78,20	81,24	90,26	61,38	76,00
248	Ketapang	85,82	81,21	60,32	74,24	84,78	81,80	60,19	74,05
249	Sintang	72,26	83,96	65,07	72,89	68,43	82,46	65,62	71,51
250	Kapuas Hulu	72,85	80,74	61,55	70,70	72,82	83,34	63,90	72,41
251	Sekadau	89,39	82,75	61,43	76,22	80,07	84,07	59,72	73,13
252	Melawi	52,25	73,04	58,23	60,88	43,20	75,30	59,08	59,18
253	Kayong Utara	91,39	81,90	55,34	74,12	92,46	84,53	48,66	72,56
254	Kubu Raya	84,13	90,26	50,11	72,36	82,61	91,84	50,33	72,47
	Kalimantan Tengah								
255	Kotawaringin Barat	0,00	94,55	78,48	59,76	2,23	94,09	78,03	60,10
256	Kotawaringin Timur	77,91	90,55	68,16	77,80	77,50	90,44	67,94	77,56

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
257	Kapuas	94,85	86,44	58,61	77,83	95,32	86,33	59,74	78,39
258	Barito Selatan	53,08	88,06	63,60	67,78	76,57	88,58	65,43	75,72
259	Barito Utara	87,93	90,63	73,82	83,10	93,79	91,12	73,24	84,77
260	Sukamara	51,92	94,26	74,18	73,52	35,66	94,28	77,08	69,81
261	Lamandau	87,37	92,07	73,18	83,10	73,91	93,02	73,38	79,43
262	Seruyan	32,30	88,89	72,91	65,52	47,56	89,92	74,06	70,87
263	Katingan	87,48	88,08	65,68	78,94	89,85	85,71	63,05	77,89
264	Pulang Pisau	94,26	89,82	62,03	80,03	94,65	90,76	63,57	81,05
265	Gunung Mas	14,41	87,72	68,85	58,18	0,00	87,51	67,25	53,15
266	Barito Timur	76,35	88,84	63,51	74,96	75,71	89,79	66,27	76,16
267	Murung Raya	40,36	84,14	57,31	60,27	55,26	88,13	57,37	65,97
	Kalimantan Selatan								
268	Tanah Laut	95,13	92,54	63,87	81,85	94,99	91,52	64,14	81,61
269	Kota Baru	86,40	88,24	68,93	79,96	82,88	89,52	67,83	78,85
270	Banjar	92,41	92,12	61,84	80,09	91,13	91,67	64,71	80,72
271	Barito Kuala	97,31	88,53	60,82	80,08	97,22	86,50	60,18	79,19
272	Tapin	97,03	89,75	69,87	83,98	96,31	90,90	72,54	85,18
273	Hulu Sungai Selatan	94,40	86,43	61,09	78,68	94,75	88,84	62,96	80,26
274	Hulu Sungai Tengah	94,41	84,64	64,47	79,50	95,18	85,20	64,37	79,86
275	Hulu Sungai Utara	92,14	90,15	64,28	80,40	93,11	91,62	64,07	81,05
276	Tabalong	86,60	86,81	71,05	80,44	88,29	88,57	71,91	81,82
277	Tanah Bumbu	89,01	93,28	79,54	86,50	87,58	92,38	78,94	85,56

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
278	Balangan	94,84	86,61	69,07	82,06	84,56	88,45	68,03	79,11
	Kalimantan Timur								
279	Paser	81,01	87,25	79,46	82,26	82,75	85,36	75,13	80,48
280	Kutai Barat	0,00	84,59	74,01	54,98	5,72	86,56	75,18	57,76
281	Kutai Kertanegara	81,76	91,64	80,65	84,28	81,40	91,71	81,99	84,73
282	Kutai Timur	49,27	87,78	80,05	73,13	30,53	86,26	77,87	66,19
283	Berau	82,39	93,71	81,26	85,34	86,54	94,40	81,22	86,77
284	Penajam Paser Utara	88,10	90,23	81,75	86,20	88,95	89,88	81,49	86,24
285	Mahakam Ulu	41,96	79,92	66,52	63,17	0,00	82,07	70,32	52,75
	Kalimantan Utara								
286	Malinau	57,15	90,86	65,94	70,78	59,74	90,60	71,40	73,66
287	Bulungan	69,09	88,76	75,68	77,63	70,35	87,10	74,88	77,19
288	Tana Tidung	0,00	93,29	64,43	53,76	8,40	92,63	64,24	56,00
289	Nunukan	72,07	87,77	73,74	77,45	68,36	89,59	72,16	76,25
	Sulawesi Utara								
290	Bolaang Mongondow	98,72	87,83	73,39	85,32	99,05	87,90	71,89	84,84
291	Minahasa	90,31	87,07	83,57	86,64	91,02	87,96	79,42	85,46
292	Kepulauan Sangihe	0,00	77,46	78,42	54,61	0,00	78,78	76,75	54,33
293	Kepulauan Talaud	85,17	82,51	77,18	81,17	87,49	85,77	75,50	82,18
294	Minahasa Selatan	91,77	81,45	80,50	84,17	95,30	78,86	78,00	83,45
295	Minahasa Utara	90,07	85,35	83,59	86,06	93,19	86,52	85,68	88,18

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
296	Bolaang Mongondow Utara	96,17	79,70	70,88	81,11	96,34	85,11	71,29	82,95
297	Kep. Siau Tagulandang Biaro	0,00	84,98	75,28	55,61	0,00	86,61	68,24	53,28
298	Minahasa Tenggara	93,99	78,57	77,24	82,66	95,92	78,09	81,11	84,64
299	Bolaang Mongondow Selatan	93,81	79,29	69,88	79,88	80,56	78,59	72,44	76,72
300	Bolaang Mongondow Timur	96,12	89,93	71,24	84,31	92,55	88,32	68,98	81,85
	Sulawesi Tengah								
301	Banggai Kepulauan	50,95	69,59	69,54	63,98	34,07	74,73	73,13	61,89
302	Banggai	94,96	88,62	75,77	85,38	95,26	88,41	75,14	85,15
303	Morowali	91,96	81,51	76,00	82,44	89,74	81,58	76,45	81,98
304	Poso	94,59	79,62	79,90	84,22	95,36	78,86	78,74	83,76
305	Donggala	86,22	68,13	58,81	69,83	88,47	73,00	62,78	73,55
306	Toli-Toli	90,74	79,15	69,24	78,66	91,65	78,34	69,89	78,95
307	Buol	88,66	72,64	72,93	77,56	94,06	76,70	73,70	80,71
308	Parigi Moutong	94,73	72,22	62,41	75,05	95,47	72,89	61,31	75,03
309	Tojo Una-Una	89,42	69,37	74,71	77,52	90,58	69,93	74,38	77,90
310	Sigi	91,47	76,30	61,04	74,75	94,25	77,99	59,67	75,54
311	Banggai Laut	1,04	72,32	67,33	48,94	0,00	71,02	70,26	49,41
312	Morowali Utara	88,95	75,44	72,48	78,31	92,00	76,43	72,74	79,63
	Sulawesi Selatan								
313	Selayar	25,85	80,59	77,60	62,97	58,87	77,14	75,51	71,01
314	Bulukumba	95,66	88,21	71,12	83,61	96,05	81,73	71,92	82,10

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
315	Bantaeng	95,78	85,02	82,84	87,38	96,31	79,89	81,38	85,41
316	Jeneponto	97,12	78,54	72,13	81,55	97,19	72,38	69,20	78,55
317	Takalar	93,86	87,23	71,32	82,85	93,98	85,23	74,01	83,36
318	Gowa	94,60	89,03	74,91	85,05	95,89	85,17	71,48	82,91
319	Sinjai	94,22	88,54	71,82	83,56	93,36	84,41	71,96	82,12
320	Maros	95,87	85,85	71,47	83,11	95,79	82,02	74,44	83,12
321	Pangkajene dan Kepulauan	91,20	78,59	70,57	79,16	92,46	76,42	67,36	77,61
322	Barru	96,56	89,41	77,05	86,61	97,20	83,38	77,83	85,31
323	Bone	98,37	86,38	68,40	82,79	98,65	83,30	67,19	81,46
324	Soppeng	98,81	88,79	74,70	86,16	99,66	85,92	64,55	81,50
325	Wajo	99,07	87,99	68,51	83,52	99,68	85,88	67,86	82,81
326	Sidenreng Rappang	99,27	91,01	75,20	87,17	99,47	90,05	69,83	84,79
327	Pinrang	99,07	84,26	70,04	83,01	99,27	83,14	71,89	83,48
328	Enrekang	95,09	80,05	68,78	80,06	94,04	74,47	71,29	79,07
329	Luwu	97,45	81,25	73,97	83,20	96,92	78,09	71,93	81,28
330	Tana Toraja	87,60	78,52	67,60	76,88	84,76	74,81	63,94	73,45
331	Luwu Utara	97,25	80,97	67,50	80,47	96,25	74,66	64,90	77,23
332	Luwu Timur	96,37	91,63	75,75	86,70	97,59	89,09	75,18	86,07
333	Toraja Utara	92,39	79,15	70,33	79,59	88,01	76,33	71,41	77,86
	Sulawesi Tenggara								
334	Buton	74,93	80,97	66,65	73,43	71,99	74,10	72,52	72,83
335	Muna	77,41	82,58	73,57	77,43	80,98	75,98	73,82	76,62

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
336	Konawe	96,14	84,76	72,28	83,18	97,30	80,76	76,70	84,10
337	Kolaka	86,28	84,18	75,53	81,35	87,90	79,72	77,05	81,11
338	Konawe Selatan	91,81	86,36	70,91	81,82	91,58	80,85	73,54	81,14
339	Bombana	91,86	84,32	75,44	83,03	94,79	82,86	74,55	83,11
340	Wakatobi	73,27	81,09	71,57	74,93	51,04	76,91	72,21	67,27
341	Kolaka Utara	87,82	79,56	74,30	79,93	81,72	76,62	75,68	77,78
342	Buton Utara	59,54	80,77	71,42	70,66	77,54	75,42	73,66	75,35
343	Konawe Utara	82,90	78,94	63,60	73,99	74,45	76,08	71,78	73,87
344	Kolaka Timur	96,91	81,88	78,16	84,90	97,52	77,00	73,31	81,68
345	Konawe Kepulauan	55,28	79,12	67,82	67,45	69,88	69,72	72,51	70,88
346	Muna Barat	86,05	81,76	69,85	78,28	88,70	71,10	69,91	75,91
347	Buton Tengah	62,54	81,38	75,79	73,49	74,13	71,03	75,70	73,83
348	Buton Selatan	77,13	80,82	57,01	70,19	76,84	72,79	63,62	70,34
	Gorontalo								
349	Boalemo	100,00	73,44	69,88	79,99	100,00	71,28	72,07	80,21
350	Gorontalo	96,03	78,12	70,05	80,26	93,01	78,26	69,67	79,25
351	Pohuwato	99,02	76,51	71,71	81,34	99,74	74,27	70,80	80,52
352	Bone Bolango	87,23	80,67	74,38	80,12	91,45	79,96	75,49	81,62
353	Gorontalo Utara	98,02	75,78	68,17	79,41	98,49	75,81	68,67	79,76
	Sulawesi Barat								
354	Majene	84,67	73,55	65,60	73,71	69,73	77,34	61,26	68,63

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
355	Polewali Mandar	94,21	71,70	58,75	73,27	94,21	73,24	58,33	73,57
356	Mamasa	94,23	70,85	50,57	69,75	91,29	74,12	50,15	69,68
357	Mamuju	93,71	83,22	63,71	78,56	94,48	86,93	66,18	80,89
358	Mamuju Utara	85,05	90,56	68,03	79,89	80,99	90,62	65,88	77,83
359	Mamuju Tengah	97,11	89,43	67,46	82,95	96,55	89,51	66,30	82,34
	Maluku								
360	Maluku Tenggara Barat	0,00	57,06	66,00	43,52	0,00	60,82	67,80	45,36
361	Maluku Tenggara	0,00	70,79	68,92	48,80	0,00	70,12	69,98	49,03
362	Maluku Tengah	77,75	68,91	70,00	72,00	78,47	71,38	66,97	71,74
363	Buru	90,71	72,90	69,60	76,92	92,23	76,61	66,46	77,23
364	Kepulauan Aru	0,00	58,85	59,27	41,37	0,00	58,63	57,93	40,76
365	Seram Bagian Barat	49,93	64,76	54,03	56,02	53,26	62,14	56,29	57,14
366	Seram Bagian Timur	77,43	61,16	55,89	63,94	55,14	62,34	56,11	57,69
367	Maluku Barat Daya	83,31	58,52	60,01	66,55	78,82	61,48	63,60	67,53
368	Buru Selatan	40,55	69,70	64,52	58,88	21,45	73,09	68,28	55,67
	Maluku Utara								
369	Halmahera Barat	7,93	87,77	63,59	54,15	0,00	87,62	64,43	52,06
370	Halmahera Tengah	48,73	78,19	67,11	64,92	0,00	81,75	62,17	49,39
371	Kepulauan Sula	0,00	81,52	61,94	49,23	0,00	86,42	64,80	51,85
372	Halmahera Selatan	0,00	88,08	60,08	50,46	0,00	88,56	60,79	50,88
373	Halmahera Utara	78,60	91,01	68,90	78,44	17,81	93,77	68,78	60,99

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
374	Halmahera Timur	91,57	76,59	59,82	74,38	88,68	77,86	58,57	73,39
375	Pulau Morotai	85,28	85,36	62,20	76,07	43,81	90,18	63,69	65,68
376	Pulau Taliabu	0,00	80,47	50,77	44,45	0,00	83,76	53,11	46,37
	Papua Barat								
377	Fak-Fak	0,00	65,45	64,68	45,51	0,00	64,66	64,15	45,06
378	Kaimana	0,00	74,81	59,05	46,06	0,00	71,83	60,46	45,73
379	Teluk Wondama	0,00	48,81	46,06	33,07	0,00	50,65	44,67	33,06
380	Teluk Bintuni	32,10	56,43	53,56	47,99	0,00	57,66	53,19	38,58
381	Manokwari	65,90	75,55	82,45	75,42	60,67	75,64	78,05	72,11
382	Sorong Selatan	0,00	67,29	57,58	43,22	0,00	64,81	50,75	39,74
383	Sorong	70,84	64,31	63,32	65,87	40,24	62,94	65,29	57,07
384	Raja Ampat	24,24	71,94	61,51	53,46	0,00	67,94	57,14	43,24
385	Tambrauw	58,12	41,12	24,61	39,62	0,00	39,63	26,46	22,47
386	Maybrat	0,00	51,55	39,14	31,12	0,00	53,13	46,62	34,59
387	Manokwari Selatan	87,53	62,86	51,67	65,78	77,09	57,49	62,34	65,31
388	Pegunungan Arfak	0,00	42,84	40,50	29,05	0,00	37,62	46,11	29,73
	Papua								
389	Merauke	97,39	82,54	59,06	77,60	96,43	83,82	59,18	77,75
390	Jayawijaya	0,00	47,29	39,17	29,85	0,00	34,66	35,45	24,58
391	Jayapura	24,90	81,54	65,44	58,11	10,35	83,38	66,98	54,91
392	Nabire	63,32	65,62	72,42	67,65	54,19	64,16	73,74	65,00

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
393	Kepulauan Yapen	0,00	57,15	65,59	43,38	0,00	57,82	66,44	43,92
394	Biak Namfor	0,00	67,80	70,43	48,51	0,00	68,43	71,35	49,07
395	Paniai	0,00	39,91	27,49	22,97	0,00	47,13	34,00	27,74
396	Puncak Jaya	0,00	51,66	36,33	30,03	0,00	33,43	40,30	26,15
397	Mimika	0,00	79,75	83,81	57,45	0,00	77,42	80,36	55,37
398	Boven Digoel	0,00	67,98	45,46	38,58	0,00	69,66	50,71	41,18
399	Mappi	0,00	43,61	38,77	28,59	0,00	52,05	39,74	31,51
400	Asmat	0,00	46,80	14,66	19,90	0,00	48,18	16,77	21,16
401	Yahukimo	0,00	19,94	38,08	21,21	0,00	21,44	29,94	18,41
402	Pegunungan Bintang	0,00	38,31	32,42	24,46	0,00	31,83	40,22	25,64
403	Tolikara	0,00	35,97	26,52	21,40	0,00	41,32	29,02	24,00
404	Sarmi	0,00	70,54	58,79	44,68	0,00	68,91	60,14	44,73
405	Keerom	37,72	75,67	65,55	60,24	48,84	71,85	62,94	61,38
406	Waropen	0,00	52,49	54,39	37,50	39,13	53,95	55,27	50,03
407	Supiori	0,00	41,97	47,48	31,59	0,00	39,03	41,01	28,11
408	Mamberamo Raya	0,00	39,45	19,92	19,80	0,00	41,14	24,03	21,95
409	Nduga	0,00	32,75	14,30	15,54	0,00	31,16	13,86	14,89
410	Lanny Jaya	0,00	29,62	34,97	22,87	0,00	36,51	36,44	25,53
411	Mamberamo Tengah	0,00	31,01	24,42	19,07	0,00	35,70	29,00	22,31
412	Yalimo	0,00	43,43	41,84	29,77	0,00	43,42	46,76	31,73
413	Puncak	0,00	6,46	26,72	12,63	0,00	15,28	28,96	16,17
414	Dogiyai	0,00	29,18	14,87	14,70	0,00	34,45	18,05	17,56

No.	Kabupaten	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
415	Intan Jaya	0,00	38,86	22,70	20,74	0,00	36,08	21,39	19,38
416	Deiyai	0,00	41,08	22,60	21,36	0,00	32,96	21,91	18,65

Keterangan

- Jumlah Kabupaten adalah 416
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Kabupaten dihitung dengan memperhitungkan IK, IA dan IP
- Bobot IK = 0,30; IA = 0,30; dan IP= 0,40

Lampiran 2.

Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Kota Tahun 2021

No.	Kota	2019			2020		
		Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
	Aceh						
1	Kota Banda Aceh	86,28	84,53	85,32	87,30	84,61	85,82
2	Kota Sabang	56,89	73,22	65,87	54,16	77,79	67,15
3	Kota Langsa	74,47	67,97	70,89	72,72	69,74	71,08
4	Kota Lhokseumawe	67,80	59,55	63,26	60,82	72,87	67,45
5	Kota Subulussalam	48,71	4,75	24,53	46,04	12,98	27,85
	Sumatera Utara						
6	Kota Sibolga	59,27	74,85	67,84	65,29	76,17	71,27
7	Kota Tanjung Balai	46,06	59,05	53,21	43,57	63,09	54,30
8	Kota Pematang Siantar	72,46	83,80	78,70	73,66	84,52	79,63
9	Kota Tebing Tinggi	72,20	64,78	68,12	69,72	69,15	69,41
10	Kota Medan	77,22	87,95	83,12	81,98	87,51	85,02
11	Kota Binjai	79,51	77,05	78,16	83,02	80,24	81,49
12	Kota Padang Sidimpuan	72,68	52,60	61,64	66,78	55,76	60,72
13	Kota Gunungsitoli	46,78	51,78	49,53	36,88	52,87	45,67
	Sumatera Barat						
14	Kota Padang	88,47	76,92	82,12	88,99	86,70	87,73
15	Kota Solok	84,40	80,06	82,02	93,53	82,48	87,45

No.	Kota	2019			2020		
		Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
16	Kota Sawah Lunto	79,19	57,69	67,36	68,94	70,55	69,82
17	Kota Padang Panjang	87,85	77,79	82,32	86,91	80,98	83,65
18	Kota Bukittinggi	91,27	87,17	89,01	90,34	87,72	88,90
19	Kota Payakumbuh	81,51	82,51	82,06	84,18	83,86	84,00
20	Kota Pariaman	79,26	67,64	72,87	74,97	71,26	72,93
	Riau						
21	Kota Pekanbaru	83,66	82,18	82,85	96,05	86,07	90,56
22	Kota Dumai	81,07	57,58	68,15	91,47	68,15	78,64
	Jambi						
23	Kota Jambi	75,49	78,06	76,90	77,62	81,46	79,73
24	Kota Sungai Penuh	82,22	60,69	70,38	77,58	71,88	74,45
	Sumatera Selatan						
25	Kota Palembang	71,25	73,64	72,57	71,80	75,49	73,83
26	Kota Prabumulih	70,74	53,45	61,23	67,49	54,19	60,17
27	Kota Pagar Alam	67,84	20,16	41,62	62,61	34,39	47,09
28	Kota Lubuklinggau	67,46	41,84	53,37	58,31	50,31	53,91
	Bengkulu						
29	Kota Bengkulu	60,06	73,12	67,24	60,34	73,94	67,82
	Lampung						
30	Kota Bandar Lampung	76,29	67,79	71,62	77,10	71,77	74,17
31	Kota Metro	81,08	73,23	76,76	78,75	75,09	76,74

No.	Kota	2019			2020		
		Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
	Kep. Bangka Belitung						
32	Kota Pangkal Pinang	91,40	77,65	83,84	92,99	77,72	84,59
	Kepulauan Riau						
33	Kota Batam	90,29	80,85	85,09	92,15	85,70	88,60
34	Kota Tanjung Pinang	82,38	75,81	78,77	81,07	78,76	79,80
	DKI Jakarta						
35	Kota Jakarta Selatan	93,89	75,21	83,62	90,08	79,78	84,41
36	Kota Jakarta Timur	89,09	76,18	81,99	87,89	80,77	83,97
37	Kota Jakarta Pusat	85,07	82,78	83,81	85,89	83,79	84,73
38	Kota Jakarta Barat	88,72	82,07	85,06	84,70	83,44	84,01
39	Kota Jakarta Utara	80,08	82,54	81,43	75,83	82,57	79,54
	Jawa Barat						
40	Kota Bogor	78,72	67,23	72,40	79,60	70,38	74,53
41	Kota Sukabumi	70,35	61,95	65,73	68,14	60,69	64,05
42	Kota Bandung	86,36	77,92	81,72	88,88	76,64	82,15
43	Kota Cirebon	74,14	68,93	71,28	74,01	72,19	73,01
44	Kota Bekasi	90,38	77,04	83,04	87,94	82,95	85,20
45	Kota Depok	95,29	73,36	83,23	95,78	78,07	86,04
46	Kota Cimahi	83,17	75,84	79,14	86,21	79,91	82,75
47	Kota Tasikmalaya	61,14	56,92	58,82	63,34	62,94	63,12
48	Kota Banjar	65,75	51,14	57,72	65,66	56,52	60,63

No.	Kota	2019			2020		
		Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
	Jawa Tengah						
49	Kota Magelang	80,66	80,85	80,76	80,82	84,04	82,59
50	Kota Surakarta	78,70	75,58	76,98	79,49	76,63	77,92
51	Kota Salatiga	87,99	78,27	82,64	91,59	80,60	85,55
52	Kota Semarang	90,17	80,14	84,66	90,28	83,72	86,67
53	Kota Pekalongan	78,05	57,92	66,98	74,44	64,27	68,85
54	Kota Tegal	75,97	77,37	76,74	76,51	79,92	78,39
	DI Yogyakarta						
55	Kota Yogyakarta	85,07	77,08	80,68	85,02	79,30	81,88
	Jawa Timur						
56	Kota Kediri	79,80	64,09	71,16	80,24	59,07	68,60
57	Kota Blitar	81,15	67,03	73,38	81,03	58,59	68,69
58	Kota Malang	91,14	78,38	84,12	91,78	78,33	84,38
59	Kota Probolinggo	86,15	63,51	73,69	83,42	63,62	72,53
60	Kota Pasuruan	71,56	66,37	68,71	72,12	68,39	70,07
61	Kota Mojokerto	86,87	79,42	82,77	84,20	75,50	79,41
62	Kota Madiun	90,12	81,23	85,23	89,69	77,28	82,86
63	Kota Surabaya	87,66	82,29	84,71	85,04	85,42	85,25
64	Kota Batu	90,20	66,32	77,06	91,13	61,33	74,74
	Banten						
65	Kota Tangerang	86,58	75,29	80,37	80,86	77,27	78,88
66	Kota Cilegon	84,36	58,68	70,23	85,16	60,18	71,42

No.	Kota	2019			2020		
		Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
67	Kota Serang	70,25	53,83	61,22	70,52	53,64	61,24
68	Kota Tangerang Selatan	97,23	71,62	83,14	99,27	71,04	83,74
	Bali						
69	Kota Denpasar	98,49	89,09	93,32	96,36	92,02	93,97
	Nusa Tenggara Barat						
70	Kota Mataram	76,08	68,40	71,86	77,70	69,96	73,44
71	Kota Bima	78,50	55,60	65,90	77,15	62,84	69,28
	Nusa Tenggara Timur						
72	Kota Kupang	79,18	69,24	73,71	81,77	70,63	75,64
	Kalimantan Barat						
73	Kota Pontianak	82,69	47,21	63,18	89,86	47,51	66,57
74	Kota Singkawang	78,63	36,21	55,30	86,05	44,55	63,22
	Kalimantan Tengah						
75	Kota Palangka Raya	87,25	65,60	75,34	90,15	72,78	80,60
	Kalimantan Selatan						
76	Kota Banjarmasin	85,11	72,22	78,02	86,47	71,70	78,34
77	Kota Banjar Baru	89,08	52,42	68,92	88,68	58,76	72,23
	Kalimantan Timur						
78	Kota Balikpapan	97,44	79,66	87,66	98,01	81,06	88,68
79	Kota Samarinda	88,62	74,31	80,75	89,13	79,29	83,72
80	Kota Bontang	91,29	79,11	84,59	93,41	82,18	87,24

No.	Kota	2019			2020		
		Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
	Kalimantan Utara						
81	Kota Tarakan	87,90	73,38	79,91	88,91	76,37	82,02
	Sulawesi Utara						
82	Kota Manado	81,40	81,38	81,39	86,08	82,53	84,13
83	Kota Bitung	74,98	63,31	68,56	78,66	68,32	72,97
84	Kota Tomohon	87,16	73,12	79,44	85,08	76,43	80,32
85	Kota Kotamobago	86,40	67,30	75,90	88,64	71,35	79,13
	Sulawesi Tengah						
86	Kota Palu	86,58	73,95	79,63	87,17	75,81	80,92
	Sulawesi Selatan						
87	Kota Makasar	90,13	79,57	84,32	85,87	82,12	83,81
88	Kota Pare-Pare	86,19	72,32	78,56	87,43	73,55	79,80
89	Kota Palopo	82,81	69,04	75,24	79,28	72,37	75,48
	Sulawesi Tenggara						
90	Kota Kendari	91,01	79,92	84,91	87,99	81,24	84,28
91	Kota Bau-Bau	83,32	61,12	71,11	81,20	65,74	72,70
	Gorontalo						
92	Kota Gorontalo	92,02	72,52	81,30	92,39	73,11	81,79
	Maluku						
93	Kota Ambon	89,07	66,86	76,85	92,65	72,76	81,71
94	Kota Tual	25,41	42,48	34,80	26,00	54,78	41,83

No.	Kota	2019			2020		
		Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit	Keterjangkauan	Pemanfaatan	Komposit
	Maluku Utara						
95	Kota Ternate	94,76	75,98	84,43	97,12	78,25	86,74
96	Kota Tidore Kepulauan	81,34	32,83	54,66	84,68	37,04	58,48
	Papua Barat						
97	Kota Sorong	66,66	65,51	66,03	66,29	76,48	71,89
	Papua						
98	Kota Jayapura	76,94	62,20	68,83	65,87	73,69	70,18

Keterangan:

- Jumlah Kota adalah 98
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Kota dihitung dengan memperhitungkan IA dan IP. Sedangkan IK tidak dimasukkan dalam perhitungan IKP
- Bobot IA = 0,45 dan IP= 0,55

Lampiran 3.

Data Indeks Ketersediaan, Indeks Keterjangkauan, Indeks Pemanfaatan dan Indeks Ketahanan Pangan Wilayah Provinsi Tahun 2021

No.	Provinsi	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
1	Aceh	80,43	70,17	67,29	70,92	81,05	69,86	68,67	71,63
2	Sumatera Utara	81,59	73,9	65,55	71,84	82,41	74,50	65,55	72,25
3	Sumatera Barat	86,11	83,39	71,12	78,64	85,05	83,23	73,45	79,55
4	Riau	29,16	84,06	69,52	64,12	32,55	86,47	71,23	66,84
5	Jambi	57,88	82,61	67,42	70	70,68	82,94	69,36	74,18
6	Sumatera Selatan	80,87	75,61	58,3	68,67	84,83	73,77	59,41	69,55
7	Bengkulu	81,45	74,54	59,82	70,28	81,69	73,68	60,35	70,32
8	Lampung	94,35	79,2	65,38	77,43	95,61	78,87	66,04	77,96
9	Kep. Bangka Belitung	32,82	92,25	78,67	71,21	41,56	92,08	78,14	73,22
10	Kepulauan Riau	0	88,16	73	62,7	0,00	87,35	74,56	63,26
11	Dki Jakarta	0	84,11	79,6	77,97	0,00	81,44	81,77	78,01
12	Jawa Barat	84,62	80	71,36	76,78	85,53	79,81	73,10	77,79
13	Jawa Tengah	89,43	81,89	78,68	82,31	89,74	81,36	79,74	82,73
14	Di Yogyakarta	81,34	80,92	80,01	80,67	83,22	79,06	82,02	81,43
15	Jawa Timur	90,54	80,54	73,58	79,9	91,16	79,54	73,75	79,70
16	Banten	78,72	83,44	63,59	73,48	83,58	83,60	63,88	74,38
17	Bali	76,39	93,18	82,71	84,54	75,32	91,65	82,74	83,82
18	Nusa Tenggara Barat	93,29	76,1	65,5	75,6	93,09	76,51	65,16	75,67

No.	Provinsi	2019				2020			
		Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit	Keter-sediaan	Keter-jangkauan	Peman-faatan	Komposit
19	Nusa Tenggara Timur	85,26	57,36	60,71	66,92	86,48	58,60	59,91	67,35
20	Kalimantan Barat	83,41	82,27	55,96	71,13	80,52	84,86	55,71	71,32
21	Kalimantan Tengah	61,4	89,38	67,57	72,58	62,93	89,99	68,51	73,68
22	Kalimantan Selatan	92,7	88,72	66,11	80,04	91,45	89,26	66,93	80,29
23	Kalimantan Timur	60,64	89,25	77,68	78,24	53,70	89,68	78,57	77,46
24	Kalimantan Utara	49,58	89,71	70,63	71,9	51,71	89,77	71,81	73,02
25	Sulawesi Utara	76,01	82,94	75,08	77,79	75,58	84,06	75,20	78,30
26	Sulawesi Tengah	80,31	76,27	70,32	75,1	80,08	77,46	71,08	75,73
27	Sulawesi Selatan	92,45	85,01	72,61	81,81	93,88	81,50	71,80	80,82
28	Sulawesi Tenggara	79,99	82,52	70,88	77,06	81,09	77,07	73,15	76,64
29	Gorontalo	96,06	79,42	71,12	80,4	96,54	78,66	71,63	80,52
30	Sulawesi Barat	91,5	79,89	62,35	76,36	87,87	81,96	61,35	75,49
31	Maluku	46,63	63,38	61,6	58,15	42,15	65,02	63,72	58,70
32	Maluku Utara	39,01	84,51	60,32	63,12	18,79	87,17	61,16	59,58
33	Papua Barat	28,23	60,74	54,59	49,4	14,83	59,25	56,29	46,05
34	Papua	7,98	49,49	42,29	34,79	8,89	49,00	43,71	35,48

Keterangan:

- Jumlah Provinsi adalah 34
- Peringkat 1 adalah peringkat terbaik
- Skor bernilai 0 – 100. Skor 100 adalah terbaik
- IKP Provinsi dihitung dengan memperhitungkan IK, IA dan IP.
- Bobot IK = 0,30; IA = 0,30; dan IP= 0,40